



**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, PENGAWASAN
INSPEKTORAT, PENATAUSAHAAN ASET TETAP, DAN KOMITMEN
MANAJEMEN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH**

Disusun Oleh :

NOVAN EKO PRIYO WIGUNO

NIM: 175020300111048

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih

Derajat Sarjana Akuntansi



JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2021



LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul:

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, PENGAWASAN
INSPEKTORAT, PENATAUSAHAAN ASET TETAP, DAN KOMITMEN
MANAJEMEN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH**

Yang disusun oleh:

Nama : Novan Eko Priyo Wiguno

NIM : 175020300111048

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Malang, 6 Desember 2021

Dosen Pembimbing,

Dr. Rosidi, SE., MM., Ak.

NIP : 195403121984031000

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, PENGAWASAN INSPEKTORAT, PENATAUSAHAAN ASET TETAP, DAN KOMITMEN MANAJEMEN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Yang disusun oleh:

Nama : Novan Eko Priyo Wiguno

NIM : 175020300111048

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 24 Desember 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. Rosidi, SE., MM., Ak.,
NIP. 195403121984031000
(Dosen Pembimbing)
2. Didied Poernawan Affandy, MBA., CA., Ak.
NIP. 196512301991031003
(Dosen Penguji 1)
3. Ayu Fury Puspita, MSA., Ak., CA.
NIP. 2013128812142001
(Dosen Penguji 2)

Malang, 13 Januari 2022
Ketua Program Studi S1 Akuntansi,



Dr. Dra. Arum Prastiwi, M.Si., Ak
NIP. : 196707142005012001



Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository

SURAT PERNYATAAN

Yang bertangtangan di bawah ini:

Nama : Novan Eko Priyo Wiguno

NIM : 175020300111048

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang Saya susun dengan judul:

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, PENGAWASAN
INSPEKTORAT, PENATAUSAHAAN ASET TETAP DAN KOMITMEN
MANAJEMEN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH**

Adalah benar-benar hasil karya Saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila di kemudian hari pernyataan Saya tidak benar, Saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (pencabutan predikat kelulusan dan gelar keserjanaannya).

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan bilamana diperlukan.

Malang, 6 Desember 2021

Pembuat Pernyataan,



Novan Eko Priyo W.

NIM. 175020300111048

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository

**ABSTRAK****PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, PENGAWASAN INSPEKTORAT, PENATAUSAHAAN ASET TETAP, DAN KOMITMEN MANAJEMEN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Oleh:
Novan Eko Priyo Wiguno

Dosen Pembimbing:
Dr. Rosidi, SE., MM., Ak.

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan representasi dari pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah daerah dan menjadi keharusan bagi pemerintah untuk menyajikan laporan keuangannya sebaik mungkin. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem pengendalian internal, pengawasan inspektorat, penatausahaan aset tetap, dan komitmen manajemen terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan media pengumpulan data berupa kuesioner yang ditujukan kepada pegawai di bidang akuntansi dan keuangan setiap SKPD Pemerintah Kota Malang. Metode analisa data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dan penatausahaan aset tetap berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan pengawasan inspektorat dan komitmen manajemen tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: sistem pengendalian internal, pengawasan inspektorat, penatausahaan aset tetap, komitmen manajemen, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

ABSTRACT

THE EFFECT OF INTERNAL CONTROL SYSTEM, INSPECTORATE SUPERVISION, FIXED ASSET ADMINISTRATION, AND MANAGEMENT COMMITMENTS ON THE FINANCIAL REPORT QUALITY OF THE REGIONAL GOVERNMENT

By:

Novan Eko Priyo Wiguno

Supervisor:

Dr. Rosidi, SE., MM., Ak.

The regional government financial reports represent the financial management of the regional governments obliged to present their financial reports accordingly. This research aims to examine the effect of internal control system, inspectorate supervision, fixed asset administration, and management commitment on the regional government financial report quality. This research employs quantitative approach in which the data are collected from questionnaires distributed to the accounting and finance staff of each SKPD (Regional Government Agencies) of Malang City Government. The results of the multiple regression analysis in this research reveal that the internal control system and fixed asset administration have a positive and significant effect on the regional government financial report quality. Whilst, inspectorate supervision and management commitment have no significant effect on the regional government financial report quality.

Keywords: internal control system, inspectorate supervision, fixed asset administration, management commitment, regional government financial report quality

**DAFTAR ISI**

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kontribusi Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Teori Keagenan	10
2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	11
2.1.3 Sistem Pengendalian Intern	14
2.1.4 Pengawasan Inspektorat	16
2.1.5 Penatausahaan Aset Tetap	19
2.1.6 Komitmen Manajemen	21
2.2 Kerangka Pemikiran	22
2.3 Pengembangan Hipotesis	23
2.3.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	23
2.3.2 Pengaruh Pengawasan Inspektorat terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	24
2.3.3 Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	25



2.3.4	Pengaruh Komitmen Manajemen terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	26
-------	--	----

BAB III METODE PENELITIAN 28

3.1	Populasi dan Sampel Penelitian	28
3.2	Data Penelitian dan Sumbernya	29
3.2.1	Jenis dan Sumber Data	29
3.2.2	Teknik Pengumpulan Data	29
3.3	Definisi Operasional Variabel Penelitian	30
3.3.1	Variabel Dependen	30
3.3.2	Variabel Independen	31
3.4	Metode Analisis Data	34
3.4.1	Pengujian Kualitas Data	35
3.4.2	Uji Asumsi Klasik	35
3.5	Pengujian Hipotesis	38
3.5.1	Analisis Regresi	38
3.5.2	Koefisien Determinasi	38
3.5.3	Uji Parsial (Uji t)	39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 40

4.1	Gambaran Umum Pemerintah Daerah	40
4.2	Deskripsi Hasil Penelitian	41
4.2.1	Deskripsi Kuesioner	41
4.2.2	Deskripsi Umum Responden	42
4.3	Hasil Uji Kualitas Data	45
4.3.1	Uji Validitas	45
4.3.2	Uji Reliabilitas	46
4.4	Hasil Uji Asumsi Klasik	47
4.4.1	Uji Normalitas	47
4.4.2	Uji Multikolinieritas	48
4.4.3	Uji Heterokedastisitas	49
4.5	Hasil Analisis Data	50
4.5.1	Analisis Regresi Linier Berganda	50
4.5.2	Koefisien Determinasi (R^2)	52
4.5.3	Hasil Uji Parsial (Uji t)	52
4.6	Pembahasan Hasil Penelitian	55
4.6.1	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	55



4.6.2	Pengaruh Pengawasan Inspektorat Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	56
4.6.3	Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	57
4.6.4	Pengaruh Komitmen Manajemen Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	59
BAB V PENUTUP.....		61
5.1	Kesimpulan	61
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	62
5.3	Saran	62
DAFTAR PUSTAKA		64

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Kuesioner Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	31
Tabel 3.2	Kuesioner Sistem Pengendalian Internal.....	32
Tabel 3.3	Kuesioner Pengawasan Inspektorat.....	32
Tabel 3.4	Kuesioner Penatausahaan Aset Tetap.....	33
Tabel 3.5	Kuesioner Komitmen Manajemen.....	34
Tabel 4.1	Daftar Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Malang.....	40
Tabel 4.2	Data Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner.....	41
Tabel 4.3	Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	42
Tabel 4.4	Deskripsi Responden Berdasarkan Usia.....	42
Tabel 4.5	Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	43
Tabel 4.6	Deskripsi Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan.....	43
Tabel 4.7	Deskripsi Responden Berdasarkan Posisi/Jabatan.....	44
Tabel 4.8	Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Bekerja di SKPD.....	44
Tabel 4.9	Hasil Uji Validitas.....	45
Tabel 4.10	Hasil Uji Reliabilitas.....	47
Tabel 4.11	Hasil Uji Kolmogorov-Sminov.....	48
Tabel 4.12	Hasil Uji Multikolinieritas.....	49
Tabel 4.13	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	49
Tabel 4.14	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	50
Tabel 4.15	Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	52
Tabel 4.16	Hasil Uji Parsial (Uji t).....	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2019..... 2

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran..... 22



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Penelitian Terdahulu
Lampiran 2	Tabulasi Data
Lampiran 3	Uji Kualitas Data
Lampiran 4	Uji Asumsi Klasik
Lampiran 5	Lembar Kuesioner



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

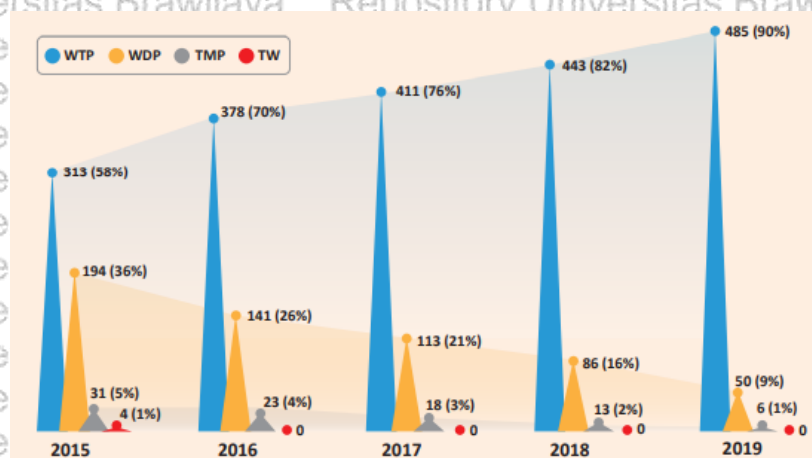
Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam mengurus dan mengatur kepentingannya sendiri, atau yang biasa disebut dengan otonomi daerah. Dalam perjalanannya, undang-undang ini mengalami perubahan dan penyempurnaan menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian diperbarui lagi menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Penerbitan undang-undang ini turut melatarbelakangi terbitnya Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, untuk memperjelas bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah, termasuk di dalamnya kewenangan untuk mengelola aset-aset milik daerah atau biasa disebut barang milik daerah. Hal ini menjadikan pemerintah daerah selayaknya agen dalam teori agensi, yang memiliki kewajiban untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya secara transparan dan akuntabilitas kepada prinsipal yaitu pemerintahan di atasnya dan masyarakat, sebagai pihak pemberi mandat dan pemilik dana. Bentuk dari pertanggungjawaban ini diwujudkan dengan disusunnya laporan keuangan pemerintah daerah.

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan sarana yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran dalam melakukan pengelolaan keuangan. Informasi yang disajikan

dalam laporan keuangan daerah haruslah dapat memberikan informasi yang berkualitas bagi para penggunanya. Baik atau tidaknya kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat diukur berdasarkan karakteristik kualitatifnya.

Sebelum dipublikasikan kepada masyarakat luas, laporan keuangan milik pemerintah daerah akan menjalani proses pemeriksaan dan penilaian oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku badan independen untuk menilai kualitas dari laporan keuangan yang disajikan oleh tiap-tiap pemerintah daerah. Dalam memberikan penilaian, BPK akan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Pemberian opini WTP merupakan opini terbaik yang menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut disajikan secara wajar dan kualitas informasi di dalamnya sangatlah baik.

Berdasarkan penilaian BPK terhadap 541 laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun 2019, menunjukkan masih adanya pemerintah daerah yang memiliki kualitas laporan keuangan kurang baik. Hal ini sebagaimana disajikan dalam gambar 1.1



Gambar 1.1 Grafik Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2019
Sumber: IHPS I Tahun 2020

Dalam rentang waktu 5 tahun, menunjukkan adanya peningkatan opini dari BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Kenaikan opini WTP sebesar 32%, dari yang sebelumnya hanya 313 pemerintah daerah (58%) pada tahun 2015 menjadi 485 pemerintah daerah (90%) pada tahun 2019. Sedangkan untuk opini WDP dan TMP mengalami penurunan. Di provinsi Jawa Timur, dari 38 pemerintah kabupaten dan kota sebanyak 36 pemerintah daerah di antaranya telah berhasil meraih opini WTP atas laporan keuangan tahun anggaran 2019. Salah satu pemerintah daerah yang berhasil dan konsisten mempertahankan opini WTP, yaitu Pemerintah Kota Malang.

Masih adanya pemerintah daerah yang belum berhasil meraih opini WTP disebabkan masih ditemukannya permasalahan-permasalahan di dalam proses pengelolaan keuangan, seperti ketidaksesuaian sistem pelaporan dengan standar akuntansi yang berlaku, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan sistem pengendalian internal yang kurang baik di tiap pemerintah daerah. Adapun laporan keuangan yang perlu disusun dan disajikan tiap tahunnya menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan perubahan saldo anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

Secara lebih lanjut BPK tidak hanya menilai laporan keuangan, namun juga memeriksa sistem pengendalian internal di tiap pemerintah daerah. Sistem pengendalian internal memiliki peranan penting dalam menjamin kualitas dari laporan keuangan yang dihasilkan. Kehadiran sistem pengendalian internal dapat menjadi penjamin keyakinan yang memadai atas informasi dari laporan keuangan

yang disajikan. Selain itu, dengan adanya sistem pengendalian internal dapat meningkatkan pengawasan dari pihak prinsipal terhadap kemungkinan tindak kecurangan yang dilakukan oleh agen. Pada lingkup pemerintahan, dalam proses penyusunan laporan keuangannya harus beriringan dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Sebagaimana telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 bahwa tujuan dari SPIP adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai demi tercapainya efektivitas dan efisiensi organisasi dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, keandalan laporan keuangan, pengaman aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Meskipun Pemerintah Kota Malang selalu berhasil dan konsisten dalam mempertahankan opini WTP atas laporan keuangannya, bukan berarti tidak terdapat permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang. Dalam dua tahun terakhir, BPK melalui siaran persnya menyampaikan adanya permasalahan yang berkaitan dengan aset tetap terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Malang. Pada laporan keuangan tahun 2018 ditemukan adanya permasalahan dalam penatausahaan aset tetap yang belum tertib, sedangkan pada laporan keuangan tahun 2019 ditemukan adanya permasalahan dalam pengelolaan aset tetap yang belum memadai. (www.jatim.bpk.go.id)

Terlepas dari permasalahan dalam sistem pengendalian internal dan permasalahan aset tetap yang belum tertib. Temuan BPK ini, mengindikasikan adanya kelemahan inspektorat daerah Kota Malang dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawasan di tingkat daerah, yang bertugas membantu kepala

daerah dalam mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Sebagai aparat pengawas, inspektorat daerah memiliki posisi yang cukup penting untuk memastikan bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah dilakukan secara optimal dan tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, bentuk pengawasan lainnya adalah dengan melakukan reviu terhadap laporan keuangan pemerintah daerah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku diiringi dengan sistem pengendalian internal yang memadai.

Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat daerah, diharapkan jika terdapat temuan permasalahan maupun kelemahan yang mempengaruhi kinerja dan pelaporan keuangan dari tiap-tiap SKPD, untuk dapat sesegera mungkin dilakukan tindak lanjut terhadap temuan tersebut. Diperlukan adanya komitmen dari pimpinan di tiap-tiap SKPD terkait untuk mau menindaklanjuti temuan tersebut. Adanya komitmen dari pimpinan selaku manajemen di SKPD, dimaksudkan agar tujuan pemerintah daerah untuk transparansi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan dapat terwujud.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut, dapat dikatakan bahwa terdapat beberapa faktor, seperti sistem pengendalian internal, penatausahaan aset tetap, pengawasan inspektorat daerah, dan komitmen manajemen yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan Sudarsono dan Darsono (2017) menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap nilai informasi laporan keuangan, sekaligus mendukung teori agensi bahwa pemerintah daerah



selaku agen yang berkewajiban untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan yang bertindak sebagai prinsipal. Penelitian lainnya yang dilakukan Febrianti (2016) di pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya menyimpulkan bahwa penatausahaan aset tetap yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Selain itu Rahayu, Yudi, dan Rahayu (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi Penerapan Paradigma Baru dalam Peran Auditor Internal Organisasi Pemerintah” menjelaskan bahwa inspektorat daerah selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai *watchdog* yang berfokus pada kesalahan dan penyimpangan, namun juga berperan sebagai konsultan dan katalisator yang lebih berfokus pada penyelesaian yang konstruktif. Dengan adanya ketiga peran ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dalam penelitian ini menggunakan empat variabel independen, yaitu sistem pengendalian internal, penatausahaan aset tetap, pengawasan inspektorat, dan menambahkan komitmen manajemen sebagai variabel tambahan. Pertimbangan penambahan variabel ini dikarenakan dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas untuk mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan daerah, diperlukan adanya komitmen manajemen dari masing-masing SKPD. Perwujudan komitmen manajemen disini tidak hanya terbatas pada dipublikasikannya laporan keuangan pemerintah daerah, namun juga upaya mengaplikasikan rekomendasi yang telah

diberikan atau juga melalui tindak lanjut terhadap temuan dan permasalahan yang dapat mengganggu pengelolaan keuangan daerah. Perbedaan lainnya terletak pada objek yang digunakan, dalam penelitian ini menggunakan pejabat dan pegawai di bidang akuntansi dan keuangan di lingkungan SKPD Pemerintah Kota Malang sebagai sampel penelitian. Pemilihan SKPD Pemerintah Kota Malang sebagai objek penelitian, dikarenakan opini laporan keuangan Pemerintah Kota Malang selalu konsisten mendapatkan opini WTP dalam sembilan tahun terakhir, sehingga dapat dijadikan percontohan dan motivasi bagi pemerintah daerah yang lainnya agar semakin baik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini berjudul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pengawasan Inspektorat, Penatausahaan Aset Tetap, dan Komitmen Manajemen Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah pengawasan inspektorat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah penatausahaan aset tetap berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

4. Apakah komitmen manajemen berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk menguji pengaruh pengawasan inspektorat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk menguji apakah penatausahaan aset tetap berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk menguji apakah komitmen manajemen berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.4 Kontribusi Penelitian

Kontribusi yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain:

1. Kontribusi teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris bahwa teori keagenan dapat diterapkan di sektor pemerintahan, dibuktikan dengan disusunnya laporan keuangan yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap warganya dalam pengelolaan keuangan, yang dalam proses penyusunannya harus diiringi dengan sistem pengendalian internal yang efektif, pengawasan dari

inspektorat, adanya penatausahaan aset tetap yang baik, dan komitmen manajemen dari setiap SKPD.

2.) Kontribusi Praktis

- a. Bagi pemerintah daerah, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan di masa mendatang dalam upaya menyajikan laporan keuangan yang berkualitas untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
- b. Bagi pihak SKPD dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap faktor-faktor yang dinilai masih kurang dalam upaya menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan menjelaskan bahwa terdapat hubungan kontraktual antara dua pihak atau lebih, dengan salah satu pihak disebut sebagai agen dan pihak lainnya disebut pemangku kepentingan (*principal*). Agen merupakan kepanjangan tangan dari pemangku kepentingan yang diberi tugas dan wewenang untuk menjalankan urusan tertentu dan mempertanggungjawabkannya langsung kepada pemangku kepentingan. Sebagai pihak yang langsung terlibat dengan perusahaan atau organisasi, menjadikan pihak pemangku kepentingan memiliki informasi namun tidak sebanyak informasi yang dimiliki agen. Perbedaan informasi inilah yang menimbulkan asimetri informasi, yang dapat memberikan peluang bagi agen untuk memanipulasi informasi perusahaan demi kepentingannya pribadi.

Menurut Yushita (2010) asimetri informasi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1. *Adverse selection*

Adverse selection adalah kondisi asimetri informasi yang terjadi karena salah satu pihak yang terlibat kontraktual memiliki informasi yang lebih banyak daripada pihak lainnya. Asimetri informasi ini terjadi dikarenakan agen selaku pihak yang berhubungan langsung dengan organisasi memiliki informasi yang lebih banyak, tidak menyampaikan informasi tersebut kepada prinsipal.

2. *Moral Hazard*

Moral Hazard adalah kondisi asimetri informasi yang terjadi karena kurangnya pengawasan dari pemangku kepentingan terhadap kinerja agen, sehingga agen dapat melakukan kecurangan demi keuntungannya pribadi.

Dalam kaitannya dengan sektor pemerintahan, teori keagenan memandang pemerintah selaku agen yang diberikan kepercayaan oleh rakyat untuk dapat mengelola keuangan yang bersumber dari rakyat dengan sebaik mungkin. Sebagai agen, tidak menutup kemungkinan pemerintah untuk melakukan tindak kecurangan pengelolaan keuangan negara demi kepentingannya pribadi dan golongan tertentu. Atas dasar tersebut diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang diwujudkan dengan disusunnya laporan keuangan pemerintah yang berkualitas, yang dalam proses penyusunannya harus diiringi dengan sistem pengendalian internal dan kegiatan penatausahaan yang baik, pengawasan dari inspektorat daerah selaku aparat pengawas internal, dan komitmen manajemen di masing-masing SKPD.

2.1.2 **Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah wujud representasi dari kinerja pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui transaksi-transaksi yang telah terjadi. Sebagai representasi dari posisi keuangan suatu organisasi, sudah menjadi keharusan bagi organisasi untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas dan memuat informasi serta data yang dapat digunakan oleh penggunanya. Mardiasmo (2018:57) menjelaskan bahwa secara garis besar, laporan keuangan memiliki tujuan umum sebagai: (1) pemberi informasi yang

berguna dalam pembuatan keputusan di bidang ekonomi, sosial, dan politik, juga dapat digunakan untuk bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan, dan (2) sebagai pemberi informasi dalam mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

Melihat betapa pentingnya peran laporan keuangan sebagai penyedia informasi, diperlukan adanya suatu persyaratan untuk menilai baik atau tidaknya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dari setiap pemerintah daerah. Salah satu cara yang dapat dilakukan dengan menilai berdasarkan karakteristik kualitatifnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 bahwa terdapat empat karakteristik kualitatif utama dalam suatu laporan keuangan yaitu:

1. Relevan. Karakteristik relevan menunjukkan bahwa laporan keuangan memuat informasi yang dapat mempengaruhi penggunaannya dalam mengambil suatu keputusan. Informasi yang relevan dapat memberikan manfaat berupa nilai prediktif, umpan balik, tepat waktu, dan lengkap.
 - a. Umpan balik. Informasi laporan keuangan memiliki nilai umpan balik jika mampu memberikan masukan sebagai koreksi atau penegasan atas prediksi yang telah dibuat di masa lalu.
 - b. Nilai prediktif. Laporan keuangan memiliki nilai prediktif apabila dapat digunakan oleh penggunaannya untuk memprediksi kemungkinan yang terjadi di masa mendatang. Ketepatan prediksi sangat bergantung pada kemampuan pengguna dalam menganalisis informasi serta data yang ada.
 - c. Tepat Waktu. Laporan keuangan harus mampu disajikan tepat waktu agar informasi yang terkandung dapat berguna di saat yang tepat, sebagai bahan pertimbangan yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap. Laporan keuangan yang disajikan telah mencakup seluruh informasi yang ada, yang dapat mempengaruhi pengguna dalam pengambilan keputusan.

2. Andal. Laporan keuangan dapat dinyatakan memenuhi karakteristik andal apabila mengandung informasi yang terbebas dari pengertian menyesatkan serta kesalahan material, fakta yang disajikan secara jujur, dan dapat diverifikasi.

a. Jujur. Keseluruhan transaksi dan peristiwa yang terjadi disajikan secara jujur dalam laporan keuangan tanpa adanya unsur rekayasa.

b. Dapat diverifikasi. Semua pihak dapat menguji kebenaran dari informasi yang disajikan tidak hanya sekali namun juga lebih, dan tiap-tiap pengujian menghasilkan kesimpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netral. Penyajian informasi dalam laporan keuangan ditunjukkan untuk umum dengan tujuan agar dapat digunakan oleh semua pihak, tanpa mementingkan dan merugikan salah satu pihak.

3. Dapat dibandingkan. Karakteristik dapat dibandingkan mengindikasikan bahwa laporan keuangan yang disajikan harus dapat dibandingkan baik secara internal dengan membandingkan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dapat dibandingkan secara eksternal dengan membandingkan laporan keuangan milik entitas lain yang serupa. Namun dengan catatan perbandingan yang dilakukan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama.

4. Dapat dipahami. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh penggunanya, baik dalam hal bentuk maupun penggunaan istilahnya. Dalam hal ini, diasumsikan jika pengguna laporan keuangan

memiliki pengetahuan dalam bidang akuntansi, ekonomi, dan memiliki kemauan untuk mempelajari informasi di dalamnya.

2.1.3 Sistem Pengendalian Intern

Menurut Jusuf (2014:356) sistem pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang telah dirancang agar entitas dapat mencapai tujuannya. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 mendefinisikan sistem pengendalian intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Selain sebagai sarana untuk mencapai tujuan organisasi, penerapan sistem pengendalian memiliki tujuan pokok lain seperti: mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, serta menjaga kekayaan organisasi (Mulyadi, 2016:129)

Secara lebih lanjut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 menjabarkan terdapat lima unsur penting dalam sistem pengendalian intern pemerintah, sebagaimana telah diterapkan di berbagai negara, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian memegang peranan penting menciptakan perilaku yang positif dalam lingkungan organisasi. Lingkungan pengendalian yang baik akan menciptakan suasana kerja yang baik pula dan mendorong organisasi dalam mencapai tujuannya.

2. Penilaian risiko

Penilaian risiko merupakan suatu proses untuk mengetahui risiko yang dihadapi oleh organisasi yang dapat menghambat organisasi dalam upaya mencapai tujuannya. Sebelum dilakukannya penilaian risiko, pemerintah terlebih dahulu telah menetapkan tujuan instansi disertai dengan arahan yang terukur, spesifik, realistis, dapat dicapai, dan terikat waktu. Penilaian risiko memiliki dua bagian, yaitu mengidentifikasi risiko dan menganalisis risiko yang berasal dari internal maupun eksternal organisasi.

3. Kegiatan Pengendalian

Dalam kegiatan pengendalian, kegiatan yang dilakukan mengacu pada hasil penilaian risiko yang sebelumnya telah dilakukan dengan menetapkan kebijakan dan prosedur apa saja yang perlu dilakukan. Bastian (2011:12) menjelaskan bahwa aktivitas pengendalian merupakan kebijakan yang dibuat untuk memastikan petunjuk yang dibuat manajemen telah dilaksanakan. Seiring berjalannya waktu kegiatan pengendalian perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk menilai keefektifannya.

4. Informasi dan Komunikasi

Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi yang ada dalam bentuk dan waktu yang tepat. Informasi yang wajib dikomunikasikan oleh pemerintah tidak hanya terbatas pada informasi yang berkaitan dengan keuangan, namun juga informasi non keuangan dengan ketentuan bahwa informasi tersebut relevan dan dapat diandalkan yang berkaitan dengan peristiwa internal maupun eksternal. Dalam



menyelenggarakan komunikasi ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan sarana komunikasi sebaik mungkin.

5. Pemantauan

Penerapan sistem pengendalian internal perlu dilakukan pemantauan sebagai bahan evaluasi dan mengkaji pelaksanaan pengendalian internal pemerintah daerah. Kegiatan pemantauan dapat dilaksanakan dengan cara pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan pemeriksaan lainnya.

2.1.4 Pengawasan Inspektorat

Inspektorat daerah merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan pemerintah daerah, baik daerah tingkat satu maupun daerah tingkat dua. Di lingkungan pemerintah daerah, inspektorat daerah bertanggungjawab langsung kepada kepala daerah untuk membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah. Sebagai aparat yang melakukan pengawasan intern, inspektorat daerah menjalankan tanggungjawabnya melalui proses audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Hasil dari pengawasan akan dirangkum dalam laporan pengawasan yang disusun oleh inspektorat untuk diberikan kepada kepala pimpinan instansi yang diawasi (PP No. 60 Tahun 2008). Dalam hal ini, inspektorat daerah dapat disebut sebagai auditor internal pemerintah.

Menurut Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI, 2013) Audit intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian

keyakinan dan konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional organisasi (auditi). Dari definisi ini menunjukkan bahwa peran dari auditor internal tidak hanya sebagai pengawas, namun juga sebagai konsultan dan sebagai katalis bagi organisasi yang diaudit. Sebagaimana dijelaskan oleh Tampubolon dalam Torar (2018), bahwa secara umum auditor internal memiliki beberapa peran dalam melaksanakan tugasnya, yaitu:

1. Peran sebagai pengawas

Peran auditor internal sebagai pengawas, menjadikan auditor internal layaknya sebagai mata dan telinga manajemen yang bertugas memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan dapat dipatuhi oleh seluruh pegawai. Peran ini menjadikan orientasi auditor internal lebih ke arah pemeriksaan ketaatan para pelaksana terhadap ketentuan dan kebijakan yang ada. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi inspeksi, observasi, perhitungan, dan pengujian transaksi dengan tujuan memastikan kepatuhan pada ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam audit ini, bila ditemukan adanya kesalahan atau penyimpangan maka auditor akan memberikan saran atau rekomendasi terhadap manajemen untuk melakukan perbaikan. Hal ini menjadikan tugas dari auditor internal seakan-akan hanya untuk mencari temuan sebanyak mungkin terhadap kesalahan yang dilakukan oleh unit-unit organisasi, dan memberikan saran atau rekomendasai yang hanya bersifat jangka pendek.

2. Peran sebagai konsultan

Peran auditor internal sebagai konsultan dengan cara membantu satuan kerja operasional mengelola risiko yang ada melalui identifikasi permasalahan dan pemberian saran yang dapat memberikan nilai tambah untuk memperkuat

organisasi. Memang sudah seharusnya auditor internal berperan sebagai konsultan karena dianggap memiliki pengalaman, keahlian investigasi dan kemampuan analitis yang memadai, sehingga menjadikan saran atau rekomendasi yang diberikan tidak hanya bersifat jangka pendek atau hanya sesaat. Peran sebagai konsultan ini juga menjadikan auditor internal tidak hanya memberikan rekomendasi atas kesalahan yang terjadi, namun juga memberikan rekomendasi sekaligus memberikan bantuan pengimplementasian rekomendasi tersebut di dalam tubuh organisasi.

3. Peran sebagai katalis

Peran auditor internal sebagai katalis memberikan kemungkinan auditor internal untuk berpartisipasi dalam menentukan tujuan perusahaan. Peran katalis disini menunjukkan bahwa auditor internal memiliki tanggungjawab untuk membuat kinerja organisasi semakin efektif dan efisien dengan cara terlibat aktif dalam melakukan penilaian resiko yang dihadapi organisasi. Dalam prosesnya analisis risiko yang dilakukan oleh auditor internal tidak hanya berdasarkan pada masa lalu atau pengalaman perusahaan, sekaligus juga mempertimbangkan bagaimana perkembangan dan risiko yang mungkin akan dihadapi oleh organisasi di masa mendatang. Hal ini menjadikan auditor internal tidak hanya bertugas dalam menemukan kesalahan, memberikan rekomendasi, dan bantuan implementasi rekomendasi tersebut. Namun juga melakukan perencanaan sistem dan program yang mendukung pencapaian tujuan dan kelangsungan organisasi.

2.1.5 Penatausahaan Aset Tetap

Menurut Hery (2015:61) mendefinisikan bahwa aset tetap merupakan aset yang secara fisik dapat dilihat keberadaannya dan relatif permanen serta memiliki masa kegunaan yang panjang. Sedangkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mendefinisikan aset tetap sebagai aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk dapat digunakan dalam kegiatan pemerintah atau masyarakat umum. Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dikategorikan aset tetap adalah aset yang secara fisik memiliki bentuk/wujud dan memiliki umur ekonomis yang panjang.

Dalam konteks pemerintahan, aset tetap dapat juga disebut dengan barang milik daerah dikarenakan dalam proses perolehannya bersumber pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau dapat pula diperoleh melalui perolehan yang sah lainnya. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 07 menyebutkan bahwa yang tergolong dalam aset tetap meliputi tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya; dan konstruksi dalam pengerjaan. Dikarenakan banyaknya komponen yang tergolong ke dalam aset tetap diperlukan adanya penatausahaan aset tetap yang baik.

Tujuan dari penatausahaan aset ini dimaksudkan agar aset yang ada dapat diketahui keberadaan serta besaran nilainya, untuk memudahkan dalam proses pelaporannya ke dalam neraca laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Pembukuan.

Pada kegiatan pembukuan terdapat aktivitas pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam daftar barang pengelola atau daftar barang pengguna sesuai dengan pihak yang menguasainya. Kegiatan ini bertujuan agar barang milik daerah dapat terdata dengan tertib secara administrasi.

Dokumen dalam tahap kegiatan pembukuan terdiri dari:

- a. Kartu Inventaris Barang (KIB) merupakan kartu untuk melakukan pencatatan barang inventaris secara terpisah maupun kolektif dengan disertai data mengenai asal, merk, tipe, kapasitas, volume, nilai perolehan dan informasi lainnya yang berkaitan dengan barang tersebut. Kartu ini digunakan selama barang tersebut belum dihapuskan.
- b. Kartu Inventaris Ruang (KIR) merupakan kartu untuk melakukan pencatatan setiap barang inventaris yang berada di dalam ruang kerja setiap SKPD.

2. Inventarisasi.

Pada kegiatan inventarisasi aset di dalamnya meliputi aktivitas menghitung, mengurus, menyelenggarakan, mengatur, mencatat, dan melaporkan aset daerah. Inventarisasi aset bertujuan untuk mengetahui secara pasti jumlah aset yang dimiliki oleh daerah dan besaran nilainya. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya dari aset-aset tersebut. Kegiatan inventarisasi dilaksanakan oleh pegawai yang ditunjuk sebagai pengguna barang, paling sedikit dilaksanakan satu kali dalam lima tahun, yang kemudian akan dirangkum ke dalam buku inventaris.

3. Pelaporan.

Kegiatan pelaporan barang milik daerah merupakan kegiatan menyusun laporan barang yang dilakukan setiap semester dan setiap tahunnya, dengan data yang bersumber dari hasil kegiatan pembukuan dan inventarisasi. Laporan barang ini nantinya akan dijadikan sebagai bahan dalam menyusun neraca pada laporan keuangan pemerintah daerah. Salah satu hal yang tidak boleh dilupakan dalam melaporkan aset daerah yaitu pengungkapannya di dalam catatan atas laporan keuangan secara memadai, atas permasalahan yang terjadi selama inventarisasi dan penyelesaian permasalahan tersebut.

2.1.6 Komitmen Manajemen

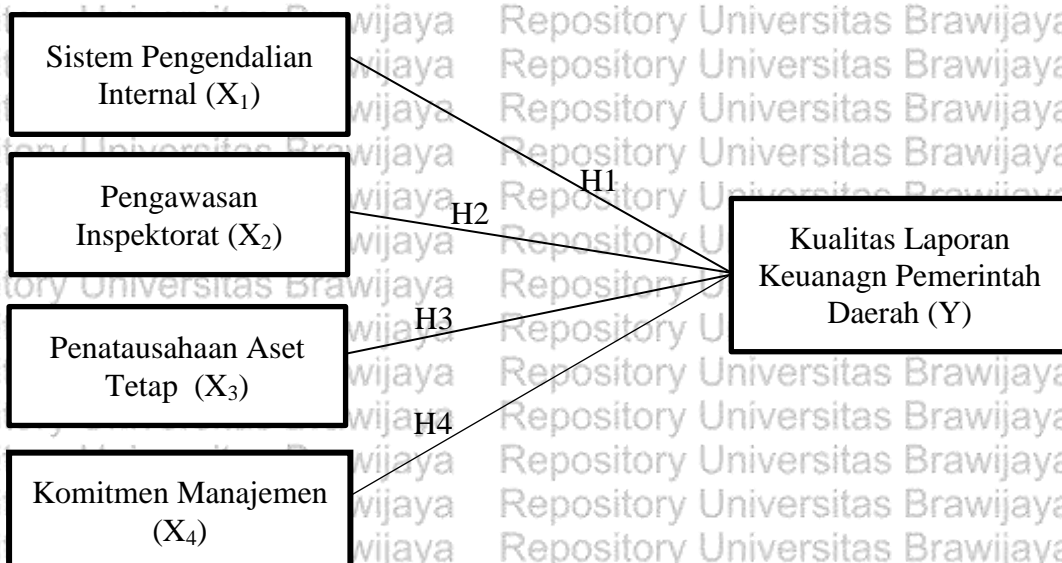
Menurut Robbins dan Judge (2007:110) komitmen didefinisikan sebagai kondisi ketika seorang individu lebih berpihak kepada organisasi dan berusaha untuk mempertahankan keanggotaannya. Pada hakikatnya, komitmen disini merupakan upaya dari individu untuk lebih mengutamakan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadinya. Bagi sebuah organisasi komitmen dari seluruh elemen sangatlah penting karena dapat mempengaruhi kinerja dari organisasi tersebut, terlebih komitmen dari manajemen sebagai pimpinan organisasi.

Nadirsyah (2008) mendefinisikan komitmen manajemen sebagai keyakinan dan dukungan manajemen untuk melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan sehingga tercapainya tujuan penerapan kebijakan tersebut. Dalam hal ini, komitmen manajemen mengharuskan manajemen untuk terlibat secara langsung di dalam organisasi yang dipimpinnya. Tujuan keterlibatan langsung di sini dimaksudkan agar manajemen selaku pimpinan organisasi dapat mengenal

organisasinya secara mendalam dan dapat mengetahui serta menganalisa secara langsung permasalahan-permasalahan yang menghambat pencapaian tujuan dan kegiatan organisasi. Supriadi, Hallah, dan Kartini (2017) menyebutkan bentuk nyata keterlibatan pimpinan meliputi pengalokasian sumber daya untuk keberlangsungan organisasi, adanya kebijakan tertulis dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai, dan pelaksanaan pelatihan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah bagan yang menggambarkan hubungan yang terjadi antar variabel yang akan menjadi fokus penelitian. Kerangka pemikiran pada penelitian ini berusaha menggambarkan dan membuktikan bahwa sistem pengendalian internal, pengawasan inspektorat, penatausahaan aset tetap, dan komitmen manajemen dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sebagaimana disajikan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem pengendalian internal adalah sistem yang dirancang oleh manajemen atau pimpinan instansi untuk diterapkan secara menyeluruh di lingkungan organisasi. Pengendalian sendiri adalah salah satu fungsi dari manajemen dalam organisasi untuk memastikan organisasi masih berjalan di arah yang tepat sesuai tujuan organisasi (Ompusunggu dan Salomo, 2018). Ditinjau dari teori agensi, penerapan sistem pengendalian internal dalam proses penyusunan laporan keuangan dapat meningkatkan pengawasan atau kontrol yang bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan kecurangan yang dapat dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja. Penerapan sistem pengendalian internal yang tidak maksimal dapat menyebabkan terjadinya tindak penyimpangan dan kemungkinan tidak terdeteksinya kecurangan maupun kesalahan yang terjadi di dalam organisasi. Kelemahan sistem pengendalian dapat berdampak terhadap informasi yang dimuat dalam laporan keuangan menjadi kurang berkualitas dikarenakan tidak memenuhi salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu keandalan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pramudiarta dan Juliarto (2015) dalam penelitiannya tentang kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap nilai informasi laporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah. Penelitian lain yang dilakukan

Armando (2013) dengan menguji variabel yang sama di SKPD Pemerintah Kota Bukittinggi menyimpulkan hal serupa, bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi. Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah dipaparkan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₁ : Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2.3.2 Pengaruh Pengawasan Inspektorat terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Inspektorat daerah selaku aparat pengawas atau auditor internal milik pemerintah daerah tidak hanya memiliki kewajiban sebagai pengawas atas penyelenggaraan urusan pemerintah. Namun juga harus melakukan pembinaan terhadap SKPD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Pembinaan yang dilakukan oleh inspektorat daerah, yaitu konsultasi dengan pimpinan organisasi selaku manajemen dari organisasi dan memberikan pertimbangan mengenai risiko yang dihadapi organisasi. Tujuan diadakannya kegiatan pengawasan dan pembinaan oleh inspektorat daerah adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap kepatuhan, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain itu inspektorat daerah sebagai auditor internal diharapkan memiliki peranan penting untuk melakukan pencegahan terhadap kemungkinan adanya kesalahan dalam laporan keuangan, melalui proses reviu terhadap laporan

keuangan pemerintah daerah sebelum diserahkan kepada BPK untuk diaudit dan dilakukan penilaian. Dalam melakukan revidi laporan keuangan, inspektorat daerah harus memiliki kompetensi yang cukup untuk memahami garis besar dari transaksi entitas, bentuk catatan akuntansi, basis akuntansi yang digunakan, serta sistem dan prosedur akuntansi (Nova, 2015). Diharapkan setelah adanya proses revidi ini, jika terdapat rekomendasi atas temuan inspektorat dapat ditindaklanjuti agar kualitas laporan keuangan yang dihasilkan semakin baik. Dengan demikian, adanya keterlibatan inspektorat ini mampu menjadikan lingkungan organisasi lebih terkontrol dan tentunya menghasilkan transparansi lebih tinggi dalam pelaporan keuangan (Husna, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Husna (2017) dengan menguji variabel kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan peran inspektorat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa peran inspektorat berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah dipaparkan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₂ : Pengawasan inspektorat daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.3.3 Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Aset adalah salah satu pos di dalam neraca laporan keuangan yang memiliki nilai cukup besar. Mengingat besarnya nilai aset yang dimiliki oleh pemerintah

daerah, diperlukan adanya penatausahaan yang baik terhadap aset-aset tersebut. Penatausahaan aset sendiri memiliki tujuan untuk menghasilkan data dan informasi yang akurat mengenai aset-aset milik pemerintah daerah, yang akan digunakan sebagai bahan acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, baik buruknya penatausahaan aset yang dilakukan oleh tiap-tiap SKPD dapat mempengaruhi kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andiani, Hapsari, dan Muslih (2017) tentang pengaruh penatausahaan dan penerapan sistem informasi manajemen akuntansi barang milik negara terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan bahwa kegiatan penatausahaan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

H₃ : Penatausahaan aset tetap berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.3.4 Pengaruh Komitmen Manajemen terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam sebuah unit organisasi komitmen manajemen sangatlah penting untuk menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Hal ini dikarenakan manajemen merupakan pimpinan organisasi, menjadikan manajemen sebagai pihak yang membuat kebijakan dan menentukan arah dari suatu organisasi. Dalam lingkup organisasi sektor publik (pemerintahan), komitmen yang kuat dari seorang manajemen diharapkan dapat memotivasi dan mendorong para pegawainya agar profesional dan bertanggung jawab dalam bekerja sesuai

dengan fungsi dan tanggungjawabnya, yang pada akhirnya dapat mendorong tercapainya tujuan pemerintah. Salah satunya adalah terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggaraeni, Purnamawati, dan Atmadja (2015) yang menguji pengaruh komitmen manajemen terhadap keterandalan pelaporan keuangan di SKPD Kabupaten Badung menyimpulkan bahwa komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap keterandalan laporan keuangan yang dihasilkan. Andal sendiri merupakan salah satu syarat laporan keuangan yang berkualitas, hal ini menunjukkan bahwa komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah dipaparkan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₁ : Komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Sugiyono (2013:117) menjelaskan bahwa yang disebut dengan populasi merupakan area generalisasi dimana dapat berupa subjek maupun objek yang memiliki karakteristik dan kualitas tertentu, sesuai dengan yang telah ditentukan oleh peneliti guna dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Sesuai dengan definisi yang telah diuraikan, maka populasi pada penelitian ini mencakup seluruh pegawai di bidang akuntansi dan keuangan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang.

Sebagian dari populasi penelitian akan dikerucutkan menjadi sampel penelitian. Menurut Sugiyono (2013:118) sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai sampelnya. Adapun kriteria yang digunakan adalah pegawai yang bersangkutan bekerja di bidang atau bagian keuangan untuk melaksanakan fungsi akuntansi/penatausahaan keuangan di SKPD Pemerintah Kota Malang dengan lama bekerja minimal satu tahun. Alasan pemilihan kriteria ini bertujuan agar pegawai yang menjadi sampel penelitian merupakan pegawai yang ahli di bidangnya dan telah memiliki pengalaman dalam menyusun laporan keuangan SKPD sebelumnya.

3.2 Data Penelitian dan Sumbernya

3.2.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini merupakan penelitian penjelasan (*explanatory*) yang menjabarkan hubungan kausal antara beberapa variabel melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan, dalam hal ini berusaha menjelaskan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti populasi dan sampel dengan tujuan menguji hipotesis yang ditetapkan (Sugiyono, 2013).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari sumbernya. Data primer ini berasal dari jawaban responden atas kuesioner yang telah dibagikan sebelumnya. Adapun yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah pegawai atau aparat pemerintahan di SKPD Kota Malang yang menjalankan fungsi akuntansi/penatausahaan keuangan.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai media atau teknik untuk pengumpulan datanya, dengan ditujukan kepada responden yang telah ditentukan sebelumnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis untuk dijawab oleh responden. (Sugiyono, 2013). Kuesioner yang disusun dalam penelitian ini berisikan pernyataan yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah, sistem pengendalian internal, pengawasan inspektorat, penatausahaan aset tetap, dan komitmen manajemen. Pernyataan-pernyataan yang telah disusun tersebut diukur menggunakan Skala Likert yang terdiri dari lima tingkat, yaitu: Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Ragu-Ragu (R), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS).

3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut atau objek yang memiliki variasi tertentu dan telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2013). Penelitian ini menggunakan lima variabel yang terdiri dari empat variabel independen (bebas) dan satu variabel dependen (terikat).

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas, dalam hal ini variabel dependen yang digunakan yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan yang berkualitas akan sangat bermanfaat bagi penggunaanya dalam mengambil keputusan. Selain itu, laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas menunjukkan komitmen dari manajemen di tingkat SKPD untuk mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Laporan keuangan yang berkualitas dilihat berdasarkan karakteristik kualitatifnya. Indikator untuk mengukur variabel kualitas laporan keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yang meliputi: relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan.

Tabel 3.1

Kuesioner Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

No	Indikator	Poin Pernyataan
1	Relevan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan evaluasi kinerja organisasi 2. Pertimbangan perencanaan program dan kebijakan 3. Ketepatan waktu dalam penyampaian 4. Kesesuaian dengan standar akuntansi yang ditetapkan
2	Andal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyajian laporan keuangan bebas dari kesalahan yang material 2. Informasi yang disajikan tidak bermakna ganda 3. Laporan keuangan dapat digunakan oleh penggunanya secara luas
3	Dapat dibandingkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya 2. Laporan keuangan dapat dibandingkan dengan milik pemerintah daerah lain
4	Dapat dipahami	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya CALK sebagai penjelas 2. Penyajian informasi dapat dipahami pengguna

3.3.2 Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang akan mempengaruhi variabel lainnya. Adapaun variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal adalah salah satu cara pencegahan, pengawasan, dan pendeteksian kecurangan yang dilakukan oleh suatu organisasi. Dalam penelitian ini, sistem pengendalian internal diukur melalui beberapa indikator dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 sebagai acuannya, adapun indikator yang digunakan meliputi: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern

Tabel 3.2

Kuesioner Sistem Pengendalian Internal

No	Indikator	Poin Pernyataan
1	Lingkungan pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur organisasi dan pembagian tanggungjawab yang jelas 2. Pegawai telah melakukan pekerjaannya secara efektif
2	Penilaian risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan dan pengkomunikasian tujuan organisasi 2. Penetapan dan pengkomunikasian strategi untuk mencapai tujuan organisasi
3	Kegiatan pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian fisik atas aset SKPD 2. Pencatatan transaksi disertai bukti 3. Evaluasi terhadap capaian dan sasaran yang telah ditetapkan 4. Sistem pengendalian internal diperbarui secara berkala
4	Informasi dan komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi antar SKPD sebagai sinergitas lintas sektoral 2. Pembaruan sistem informasi secara berkala
5	Pemantauan pengendalian intern	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan penyusunan laporan keuangan 2. Tindak lanjut terhadap rekomendasi dari hasil audit dan reviu

2. Pengawasan Inspektorat

Inspektorat daerah merupakan pembantu kepala daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dijalankan oleh satuan kerja perangkat daerah. Sebagai aparat pengawas internal, inspektorat daerah menjalankan perannya melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Pengukuran variabel penelitian mengacu pada Tampubolon dalam Torar (2018) melalui 3 indikator yaitu: pengawas, konsultan, dan katalis.

Tabel 3.3

Kuesioner Pengawasan Inspektorat

No	Indikator	Poin Pernyataan
1	Pengawas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan kepatuhan SKPD 2. Inspektorat daerah mengobservasi kelemahan dan permasalahan SKPD 3. Pelaksanaan inspeksi mendadak di tiap SKPD 4. Peninjauan kesesuaian program dengan perencanaannya

No	Indikator	Poin Pernyataan
2	Konsultan	1. Pemberian layanan konsultasi 2. Pemberian saran dan rekomendasi 3. Peninjauan secara berkesinambungan
3	Katalis	1. Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan 2. Evaluasi terhadap laporan keuangan SKPD

3. Penatausahaan Aset Tetap

Besarnya nilai aset tetap yang dikuasai oleh pemerintah daerah menjadikan pengelolaan aset tetap haruslah dilakukan dengan sebaik mungkin. Salah satu kegiatan yang memiliki peranan penting dalam pengelolaan aset adalah kegiatan penatausahaan. Hal ini dikarenakan dalam kegiatan penatausahaan aset tetap tidak hanya terbatas pada pendataan aset, namun juga perhitungan nilai aset hingga pada pelaporannya. Pengukuran variabel ini mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Tabel 3.4
Kuesioner Penatausahaan Aset Tetap

No	Indikator	Poin Pernyataan
1	Pembukuan	1. Pembukuan sebagai bahan evaluasi antara perencanaan dan pencapaiannya 2. Keberadaan barang dapat ditelusuri
2	Inventarisasi	1. Inventarisasi membantu rekonsiliasi 2. Inventarisasi mempengaruhi laporan keuangan
3	Pelaporan	1. Adanya laporan barang milik daerah. 2. Laporan barang milik daerah sebagai bahan menyusun neraca laporan keuangan

4. Komitmen Manajemen

Bagi sebuah organisasi, komitmen manajemen dapat mempengaruhi kinerja dari organisasi tersebut. Dalam upaya menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, diperlukan adanya komitmen dari manajemen untuk memberikan

arahan dan membuat kebijakan untuk para pegawainya agar bekerja secara profesional sesuai dengan fungsinya. Pengukuran variabel komitmen manajemen dilakukan dengan mengacu pada indikator yang digunakan oleh Supriadi, Hallah, dan Kartini (2017) dalam mengukur komitmen manajemen atau pimpinan yaitu, adanya kebijakan, alokasi sumber daya, sosialisasi, dan pelatihan.

Tabel 3.5
Kuesioner Komitmen Manajemen

No	Indikator	Poin Pernyataan
1	Adanya kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan atau instruksi dari pimpinan SKPD terkait penyusunan laporan keuangan 2. Kebijakan atau instruksi dari pimpinan SKPD untuk menindaklanjuti rekomendasi 3. Kurangnya komitmen pimpinan SKPD dalam menggunakan laporan kinerja pegawai
2	Alokasi sumber daya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendelegasian tanggungjawab sesuai dengan kompetensi pegawai yang bersangkutan 2. Adanya sarana dan prasarana yang mendukung penyusunan laporan keuangan 3. Adanya pegawassan pengalokasian dana dari pimpinan SKPD
3	Sosialisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan atau peraturan yang dibuat pimpinan SKPD tersampaikan kepada seluruh pegawai 2. Evaluasi secara berkala terhadap kebijakan yang telah ditetapkan
4	Pelatihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pelatihan terhadap para pegawai secara berkala 2. Adanya diskusi atau konsultasi dengan inspektorat daerah untuk memperbaiki kinerja SKPD yang kurang optimal

3.4 Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah data terkumpul dengan menggunakan alat bantu berupa *software Statistical Package for Social Science (SPSS)* versi 24.

Terdapat beberapa tahapan dalam menganalisis data yaitu pengujian kualitas data, pengujian asumsi klasik, serta pengujian analisis regresi linier berganda.

3.4.1 Pengujian Kualitas Data

3.4.1.1 Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu pengujian instrumen data yang bertujuan mengetahui seberapa tepat item dalam mengukur apa yang ingin diukur (Priyatno, 2014:51). Uji validitas dilakukan dengan menggunakan metode korelasi Pearson, dengan memperhatikan nilai Pearson Correlation atau yang biasa disebut sebagai *r*-hitung untuk dibandingkan dengan nilai *r*-tabel. Item pertanyaan dapat dinyatakan telah valid atau tepat, apabila nilai Pearson Correlation lebih besar dari nilai *r*-tabel. Namun, item pertanyaan dinyatakan tidak valid apabila nilai Pearson Correlation kurang dari nilai *r*-tabel, maka item pertanyaan tersebut harus dibuang atau diganti dengan item pertanyaan lain.

3.4.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas berfungsi sebagai alat ukur kekonsistensian atau keandalan instrumen penelitian yang digunakan. Andai disini bermakna bahwa instrumen penelitian menghasilkan ukuran yang konsisten apabila digunakan untuk mengukur berulang kali (Trihendradi, 2013:277). Item pertanyaan yang telah lolos uji validitas, kemudian dilakukan pengujian reliabilitas dengan memperhatikan besaran nilai *Cronbach's Alpha*. Suatu variabel dapat dikatakan reliabel apabila memperoleh nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,6.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Setelah instrumen dalam penelitian memenuhi syarat valid dan reliabel, dapat dilanjutkan dengan melakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik menjadi



salah satu tahapan yang wajib dilaksanakan sebelum melakukan analisis lebih lanjut untuk uji hipotesis dan penarikan kesimpulan terhadap data yang telah diperoleh sebelumnya. Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

3.4.2.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari model regresi telah terdistribusi secara normal atau tidak (Priyatno, 2014:90). Terdapat beberapa metode pada pengujian normalitas yang dapat dilakukan, diantaranya dengan metode menganalisis grafik pada garis sumbu dan juga dengan metode menganalisis statistik melalui *Kolmogrov-Smirnov*. Penelitian ini menggunakan pengujian normalitas melalui metode *Kolmogrov-Smirnov* dikarenakan hasil pengujian lebih akurat dan objektif daripada melalui metode analisis grafik. Dalam pengujian melalui *Kolmogrov-Smirnov*, data dinyatakan berdistribusi normal bila memiliki nilai signifikansi (*p-value*) lebih besar dari taraf signifikansi yang telah ditentukan sebesar 0.05.

3.4.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah pengujian dengan tujuan mengetahui apakah terdapat hubungan atau korelasi antar variabel independen dalam model regresi yang dilakukan. Model regresi yang baik merupakan model regresi yang di dalamnya tidak terdapat korelasi sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independennya (Priyatno, 2014:99). Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan membandingkan nilai *tolerance* dan nilai *Variance Inflation*

Factor (VIF). Pada uji multikolinieritas, data dinyatakan terbebas dari gejala multikolinieritas jika memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0.10 dengan nilai VIF kurang dari 10. Namun, apabila nilai *tolerance* kurang dari 0.10 dengan nilai VIF lebih dari 10, maka dalam model regresi tersebut terdapat gejala multikolinieritas.

3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah ketidaksamaan varian residual pada semua pengamatan di dalam model regresi (Priyatno, 2014:108). Uji Heteroskedastisitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varian dari residual pengamatan satu ke pengamatan lainnya. Jika pada varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain berbeda disebut heteroskedastisitas. Sebaliknya, dinyatakan homoskedastisitas apabila pada varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain sama maka disebut homoskedastisitas. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan dalam pengujian heteroskedastisitas, diantaranya melalui analisis terhadap pola grafik *scatterplot* dan juga dapat melalui metode uji *Glesjer*. Dalam penelitian ini pengujian heteroskedastisitas menggunakan metode uji *Glesjer*, agar hasil yang diperoleh lebih akurat. Pada pengujian menggunakan metode uji *Glesjer*, model regresi dinyatakan terbebas dari gejala heteroskedastisitas apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 0.05.

3.5 Pengujian Hipotesis

3.5.1 Analisis Regresi

Analisis regresi adalah analisis yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara sistem pengendalian internal, pengawasan inspektorat, penatausahaan aset tetap, serta komitmen manajemen terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y : Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

α : Konstanta

β_1, \dots, β_4 : Koefisien regresi

X_1 : Sistem pengendalian internal

X_2 : Pengawasan inspektorat

X_3 : Penatausahaan aset tetap

X_4 : Komitmen manajemen

ε : Nilai residual

3.5.2 Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi adalah pengujian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan pada variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2018:97). Nilai koefisien determinasi ditunjukkan dalam *R-square* (R^2). Semakin kecil nilai koefisien determinasi atau mendekati angka 0, maka semakin terbatas kemampuan variabel

independen dalam menjelaskan variabel dependen. Sedangkan jika nilai koefisien determinasi semakin mendekati angka 1, maka semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

3.5.3 Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial atau yang biasa disebut uji t merupakan pengujian yang digunakan untuk menguji sejauh mana pengaruh variabel independen secara parsial atau secara individu menerangkan variabel dependennya (Ghozali, 2018:99). Dalam pengujian ini tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 0,05 untuk menunjukkan hipotesis asli (H_0) diterima atau ditolak. Keputusan untuk menolak atau menerima H_0 didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. H_0 akan ditolak jika nilai probabilitas (*p-value*) $< 0,05$ yang artinya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. H_0 akan diterima jika nilai probabilitas (*p-value*) $> 0,05$ yang artinya bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Pemerintah Daerah

Pada penelitian ini menggunakan Pemerintah Daerah Kota Malang sebagai objek penelitian, lebih tepatnya Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Malang.

Populasi dalam penelitian menggunakan pegawai di bagian keuangan yang berkaitan langsung dengan penyusunan/penatausahaan laporan keuangan, dengan pegawai yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian. Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Malang yang digunakan sebagai objek penelitian terdiri dari 7 badan dan 13 dinas, sebagai berikut:

Tabel 4.1
Daftar Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Malang

No	Nama SKPD	Alamat
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jalan Tugu No. 1 Malang
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jalan Jend. A. Yani No. 98 Malang
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jalan Tugu No. 1 Malang
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jalan Danau Ranau Raya 1A Malang
5	Badan Pendapatan Daerah	Perkantoran Terpadu Gedung B Lt. 1 Jalan Mayjend Sungkono Malang
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jalan Tugu No. 1 Malang
7	Satuan Polisi Pamong Praja	Jalan Simpang Mojopahit No. 1 Malang
8	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	Jalan Tenes Malang
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perkantoran Terpadu Gedung A Lt. 2 Jalan Mayjend Sungkono Malang
10	Dinas Kesehatan	Jalan Simpang Laksda Adisucipto No. 45 Malang
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jalan A. Yani Utara No. 202 Malang

No	Nama SKPD	Alamat
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	Perkantoran Terpadu Gedung A Lt. 4 Jalan Mayjend Sungkono Malang
13	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Jalan Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Malang
14	Dinas Lingkungan Hidup	Jalan Bingkil No. 1 Malang
15	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jalan Bingkil No. 1 Malang
16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jalan Veteran No. 19 Malang
17	Dinas Perhubungan	Jalan Raden Intan No. 1 Malang
18	Dinas Perpustakaan dan Umum dan Arsip Daerah	Jalan Ijen No. 30A Malang
19	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jalan Raya Gribig No. 5 Malang
20	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perkantoran Terpadu Gedung A Lt. 2 Jalan Mayjend Sungkono Malang

Sumber: Data diolah, 2021

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1 Deskripsi Kuesioner

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner ke 20 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Malang. Periode penyebaran dan pengumpulan kuesioner dilakukan mulai tanggal 2 – 30 September 2021.

Kuesioner yang disebarkan sebanyak 82 kuesioner, dengan kuesioner yang tidak kembali dan tidak terisi lengkap sebanyak 15 kuesioner. Sedangkan, yang memenuhi kriteria untuk dapat dilakukan pengolahan data sebanyak 67 kuesioner,

Tabel 4.2
Data Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner

Kuesioner	Jumlah
Kuesioner yang disebarkan	82
Kuesioner yang tidak kembali dan tidak lengkap	(15)
Kuesioner yang dapat diolah	67

Sumber: Data diolah, 2021

4.2.2 Deskripsi Umum Responden

Berdasarkan data yang telah berhasil dikumpulkan, secara umum responden dapat dideskripsikan berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, latar belakang pendidikan, posisi/jabatan dan lama bekerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut.

1. Jenis Kelamin

Tabel 4.3

Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Pria	28	41.8%
Wanita	39	58.2%
Total	67	100%

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa berdasarkan jenis kelamin, mayoritas responden merupakan wanita dengan jumlah 39 orang (58.2%) dan sisanya merupakan pria dengan jumlah 28 orang (41.8%).

2. Usia

Tabel 4.4

Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Presentase
20 – 30 Tahun	5	7.4%
31 – 40 Tahun	18	26.9%
41 – 50 Tahun	28	41.8%
> 50 Tahun	16	23.9%
Total	67	100%

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa berdasarkan usia, mayoritas responden berada di rentang usia 41 - 50 tahun dengan jumlah responden 28 orang (41.8%). Responden dengan rentang usia 31 – 40 tahun berjumlah 18 orang (26.9%), responden dengan usia lebih dari 50 tahun berjumlah 16 orang (23.9%),

dan sisanya responden dengan rentang usia 20 – 30 tahun berjumlah 5 orang (7.4%).

3. Pendidikan Terakhir

Tabel 4.5

Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Presentase
SMA	8	11.9%
D3	6	9%
S-1	37	55.2%
S-2	16	23.9%
Total	67	100%

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa mayoritas responden memiliki pendidikan terakhir jenjang S-1 dengan jumlah responden sebesar 37 orang (55.2%). Responden dengan pendidikan terakhir jenjang S-2 berjumlah 16 orang (23.9%), sedangkan responden dengan pendidikan terakhir jenjang SMA berjumlah 8 orang (11.9%), dan sisanya merupakan responden dengan pendidikan terakhir jenjang D3 berjumlah 6 orang (9%).

4. Latar Belakang Pendidikan

Tabel 4.6

Deskripsi Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Latar Belakang Pendidikan	Jumlah	Presentase
Akuntansi	20	29.9%
Ekonomi Non-Akuntansi	14	20.9%
Non Ekonomi	33	49.2%
Total	67	100%

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa mayoritas responden memiliki latar belakang pendidikan non-ekonomi dengan jumlah responden sebesar 33 orang (49.2%). Responden dengan latar belakang pendidikan akuntansi berjumlah

20 orang (29.9%), dan sisanya merupakan responden dengan latar belakang pendidikan ekonomi non-akuntansi berjumlah 14 orang (20.9%).

5. Posisi/jabatan

Tabel 4.7

Deskripsi Responden Berdasarkan Posisi/Jabatan

Posisi/Jabatan	Jumlah	Presentase
Kasubag Keuangan	15	22.4%
Bendahara Penerimaan/Pengeluaran	15	22.4%
Staf Bagian Keuangan	37	55.2%
Total	67	100%

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa mayoritas responden memiliki posisi atau jabatan sebagai staf bagian keuangan dengan jumlah responden sebesar 37 orang (55.2%). Responden dengan posisi atau jabatan sebagai bendahara, baik bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran berjumlah 15 orang (22.4%). Sedangkan sisanya merupakan responden dengan posisi atau jabatan sebagai kepala subbagian keuangan berjumlah 15 orang (22.4%).

6. Lama Bekerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah

Tabel 4.8

Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Bekerja di SKPD

Lama Bekerja	Jumlah	Presentase
< 5 Tahun	10	14.9%
5 – 10 Tahun	13	19.4%
11 – 15 Tahun	20	29.9%
> 15 Tahun	24	35.8%
Total	67	100%

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa mayoritas responden telah bekerja di SKPD lebih dari 15 tahun dengan jumlah responden sebesar 24 orang (35.8%). Responden dengan lama bekerja di SKPD dalam rentang 11 – 15 tahun berjumlah 20 orang (29.9%), responden dengan lama bekerja di SKPD dalam rentang 5 – 10 tahun berjumlah 13 orang (19.4%), dan sisanya merupakan

responden dengan lama bekerja di SKPD kurang dari 5 tahun dengan jumlah responden sebesar 10 orang (14,9%).

4.3 Hasil Uji Kualitas Data

4.3.1 Uji Validitas

Dilakukannya uji validitas bertujuan untuk menguji valid tidaknya item pertanyaan yang diajukan dalam penelitian. Pengujian validitas dilakukan dengan memperhatikan nilai *Pearson Correlation* setiap item pertanyaan, baik pertanyaan untuk variabel independen maupun pertanyaan untuk variabel dependen. Item pernyataan dikatakan valid jika nilai *Pearson Correlation* lebih besar daripada nilai *r*-tabel. Berdasarkan perhitungan, nilai *r*-tabel untuk data dengan jumlah responden sebanyak 67 orang dan taraf signifikansi 5% adalah sebesar 0.240.

Tabel 4.9
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Pearson Correlation	r-tabel	Keterangan
Sistem Pengendalian Internal	X1.1	0.684	0.240	Valid
	X1.2	0.708	0.240	Valid
	X1.3	0.819	0.240	Valid
	X1.4	0.809	0.240	Valid
	X1.5	0.823	0.240	Valid
	X1.6	0.706	0.240	Valid
	X1.7	0.740	0.240	Valid
	X1.8	0.797	0.240	Valid
	X1.9	0.589	0.240	Valid
	X1.10	0.613	0.240	Valid
	X1.11	0.710	0.240	Valid
	X1.12	0.667	0.240	Valid
Pengawasan Inspektorat	X2.1	0.638	0.240	Valid
	X2.2	0.569	0.240	Valid
	X2.3	0.680	0.240	Valid
	X2.4	0.675	0.240	Valid
	X2.5	0.788	0.240	Valid
	X2.6	0.798	0.240	Valid
	X2.7	0.809	0.240	Valid
	X2.8	0.629	0.240	Valid

Variabel	Item	Pearson Correlation	r-tabel	Keterangan
Penatausahaan Aset Tetap	X2.9	0.676	0.240	Valid
	X3.1	0.832	0.240	Valid
	X3.2	0.787	0.240	Valid
	X3.3	0.830	0.240	Valid
	X3.4	0.732	0.240	Valid
	X3.5	0.797	0.240	Valid
Komitmen Manajemen	X3.6	0.851	0.240	Valid
	X4.1	0.686	0.240	Valid
	X4.2	0.742	0.240	Valid
	X4.3	0.379	0.240	Valid
	X4.4	0.784	0.240	Valid
	X4.5	0.729	0.240	Valid
	X4.6	0.716	0.240	Valid
	X4.7	0.826	0.240	Valid
	X4.8	0.768	0.240	Valid
	X4.9	0.327	0.240	Valid
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	X4.10	0.573	0.240	Valid
	Y1	0.808	0.240	Valid
	Y2	0.895	0.240	Valid
	Y3	0.679	0.240	Valid
	Y4	0.857	0.240	Valid
	Y5	0.868	0.240	Valid
	Y6	0.840	0.240	Valid
	Y7	0.868	0.240	Valid
	Y8	0.882	0.240	Valid
	Y9	0.547	0.240	Valid
	Y10	0.865	0.240	Valid
Y11	0.842	0.240	Valid	

Sumber: Data diolah, 2021

Hasil pengujian validitas yang telah dilakukan dan ditunjukkan pada tabel 4.9, dapat diketahui bahwa setiap item pertanyaan dari masing-masing variabel memiliki nilai *Pearson Correlation* lebih besar dari nilai r-tabel. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pertanyaan yang diajukan dalam penelitian telah valid.

4.3.2 Uji Reliabilitas

Tujuan uji reliabilitas adalah untuk mengetahui keandalan dan konsistensi hasil pengukuran jika pengukuran dilakukan kembali atau berulang terhadap objek

dan alat ukur yang sama. Instrumen penelitian dinyatakan reliabel jika besar nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0.6.

Tabel 4.10
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Sistem Pengendalian Internal	0.914	Reliabel
Pengawasan Inspektorat	0.859	Reliabel
Penatausahaan Aset Tetap	0.889	Reliabel
Komitmen Manajemen	0.825	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0.941	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa masing-masing variabel yang diujikan memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0.60. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel-variabel yang digunakan sebagai instrumen penelitian telah reliabel.

4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah pengujian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi data yang telah diperoleh, agar dapat dianalisis serta ditentukan model analisis yang tepat. Dalam penelitian ini menggunakan empat variabel independen dan satu variabel dependen, dengan uji asumsi klasik yang digunakan terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas.

4.4.1 Uji Normalitas

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah nilai residual antara variabel independen dan variabel dependen terdistribusi dengan normal atau tidak. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan uji

Kolmogorov-Smirnov. Tabel di bawah ini merupakan hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov:

Tabel 4.11
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

		Unstandardized Residual
N		67
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.92214717
Most Extreme Differences	Absolute	.104
	Positive	.104
	Negative	-.093
Test Statistic		.104
Asymp. Sig. (2-tailed)		.069

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan hasil pengujian normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov di atas, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.069. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0.05 ($p > 0.05$), maka dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi.

4.4.2 Uji Multikolinieritas

Tujuan dari uji multikolinieritas adalah untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel bebas yang ditemukan dalam model regresi. Ada atau tidaknya gejala multikolinieritas dalam model regresi dapat dilakukan dengan memperhatikan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) maupun nilai tolerance. Jika menggunakan nilai VIF sebagai acuan, data dinyatakan terbebas dari gejala multikolinieritas jika besar nilai VIF kurang dari 10.00. Namun, jika menggunakan nilai tolerance sebagai acuan, data dinyatakan terbebas dari gejala multikolinieritas jika besar nilai tolerance lebih besar dari 0.10.

Tabel 4.12
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Sistem Pengendalian Internal	0.410	2.437
Pengawasan Inspektorat	0.514	1.945
Penatausahaan Aset Tetap	0.362	2.762
Komitmen Manajemen	0.372	2.691

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen memiliki nilai tolerance lebih dari 0.10 dan nilai VIF kurang dari 10.00, maka dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak ditemukan adanya gejala multikolinieritas.

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan dengan pengamatan yang lainnya. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Glesjer. Model regresi dinyatakan terbebas dari gejala heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0.05. Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glesjer adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.
Sistem Pengendalian Internal	0.758
Pengawasan Inspektorat	0.786
Penatausahaan Aset Tetap	0.451
Komitmen Manajemen	0.602

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.13 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi masing-masing variabel independen lebih besar dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

4.5 Hasil Analisis Data

4.5.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Pada analisis ini menggunakan model analisis regresi berganda. Pemilihan analisis regresi linier ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial atau terpisah. Adapun yang menjadi variabel independen dalam analisis ini meliputi sistem pengendalian internal (X_1), pengawasan inspektorat (X_2), penatausahaan aset tetap (X_3), dan komitmen manajemen (X_4), sedangkan yang menjadi variabel dependen adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil analisis regresi berganda adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
Constant	1,001	4,716
Sistem Pengendalian Internal	0,369	0,124
Pengawasan Inspektorat	0,076	0,147
Penatausahaan Aset Tetap	0,928	0,236
Komitmen Manajemen	-0,011	0,167

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda di atas, antara variabel sistem pengendalian internal, pengawasan inspektorat, penatausahaan aset tetap, dan komitmen manajemen terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

$$Y = 1,001 + 0,369 X_1 + 0,076 X_2 + 0,928 X_3 - 0,011 X_4$$

Dari persamaan tersebut dapat dijabarkan hal-hal sebagai berikut:

- Nilai konstanta (α) adalah sebesar 1,001 yang menyatakan bahwa tanpa adanya pengaruh dari variabel independen sistem pengendalian internal,

pengawasan inspektorat, penatausahaan aset tetap, dan komitmen manajemen, maka nilai dari kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen adalah sebesar 1,001.

b. Nilai koefisien regresi dari variabel independen sistem pengendalian internal (β_1) adalah sebesar 0,369. Nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan nilai sistem pengendalian internal sebesar satu satuan akan berpengaruh terhadap kenaikan nilai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,369 dengan asumsi bahwa variabel lain bernilai nol.

c. Nilai koefisien regresi dari variabel independen pengawasan inspektorat (β_2) adalah sebesar 0,076. Nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan nilai pengawasan inspektorat sebesar satu satuan akan berpengaruh terhadap kenaikan nilai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,076 dengan asumsi bahwa variabel lain bernilai nol.

d. Nilai koefisien regresi dari variabel independen penatausahaan aset tetap (β_3) adalah sebesar 0,928. Nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan nilai penatausahaan aset sebesar satu satuan akan berpengaruh terhadap kenaikan nilai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,928 dengan asumsi bahwa variabel lain bernilai nol.

e. Nilai koefisien regresi dari variabel independen komitmen manajemen (β_4) adalah sebesar -0,011. Nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan nilai komitmen manajemen sebesar satu satuan akan berpengaruh terhadap penurunan nilai kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah sebesar $-0,011$ dengan asumsi bahwa variabel lain bernilai nol.

4.5.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefien determinasi dilakukan dengan tujuan menjelaskan seberapa besar presentase pengaruh variabel independen dalam memengaruhi variabel dependen secara simultan. Uji koefisen determinasi dilakukan dengan memperhatikan nilai *adjusted R square*. Hasil pengujian koefisien determinasi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.15

Hasil Uji Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,806	0,650	0,627	3,015

Sumber: Data diolah, 2021

Pada tabel di atas diketahui bahwa nilai koefisien determinasi adalah sebesar 0,650 yang menunjukkan bahwa secara simultan, variabel-variabel independen dalam penelitian yaitu sistem pengendalian internal, pengawasan inspektorat, penatausahaan aset tetap, dan komitmen manajemen mempengaruhi variabel dependen kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,650 atau 65%. Hal ini menjelaskan bahwa terdapat 35% faktor lain di luar variabel yang digunakan dalam penelitian, yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4.5.3 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial atau yang biasa disebut uji t bertujuan untuk menjelaskan ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (terpisah). Uji parsial dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu

membandingkan besar nilai t hitung dengan t tabel serta membandingkan nilai signifikansi setiap variabel independen. Variabel independen dinyatakan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen, apabila nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel dengan nilai signifikansi (α) kurang dari 0,05. Sedangkan jika t hitung lebih kecil daripada nilai t tabel dengan nilai signifikansi (α) lebih besar dari 0,05, sehingga variabel independen dinyatakan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Berikut hasil pengaruh variabel independen secara parsial menggunakan uji t :

Tabel 4.16
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variabel	T	Sig.
Sistem Pengendalian Internal	2.979	0.004
Pengawasan Inspektorat	0.519	0.605
Penatausahaan Aset Tetap	3.929	0.000
Komitmen Manajemen	-0.068	0.946

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.15 diperoleh hasil uji parsial yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Hasil uji parsial antara variabel sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, diperoleh hasil t hitung sebesar 2,979 dengan nilai signifikansi 0,004. Nilai t hitung (2,979) lebih besar dari nilai t tabel (1,999), begitu pula dengan nilai signifikansi (0,004) yang kurang dari 0,05 sehingga kesimpulan yang dapat ditarik bahwa secara parsial variabel sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis H_1 yang menyatakan sistem pengendalian

internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat diterima.

- b. Hasil uji parsial antara variabel pengawasan inspektorat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, diperoleh hasil t hitung sebesar 0,519 dengan nilai signifikansi 0,605. Nilai t hitung (0,519) lebih kecil dari nilai t tabel (1,999), begitu pula dengan nilai signifikansi (0,605) yang lebih besar dari 0,05 sehingga kesimpulan yang dapat ditarik bahwa secara parsial variabel pengawasan inspektorat tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis 2 yang menyatakan pengawasan inspektorat berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak dapat diterima atau ditolak.

- c. Hasil uji parsial antara variabel penatausahaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, diperoleh hasil t hitung sebesar 3,929 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai t hitung (3,929) lebih besar dari nilai t tabel (1,999), begitu pula dengan nilai signifikansi (0,000) yang kurang dari 0,05 sehingga kesimpulan yang dapat ditarik bahwa secara parsial variabel penatausahaan aset tetap berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis 3 yang menyatakan penatausahaan aset tetap berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat diterima.

- d. Hasil uji parsial antara variabel komitmen manajemen terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, diperoleh hasil t hitung sebesar

-0,068 dengan nilai signifikansi 0,946. Nilai t hitung (-0,068) lebih kecil dari nilai t tabel (1,999), begitu pula dengan nilai signifikansi (0,946) yang lebih besar dari 0,05 sehingga kesimpulan yang dapat ditarik bahwa secara parsial variabel komitmen manajemen tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis 4 yang menyatakan komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak dapat diterima atau ditolak.

4.6 Pembahasan Hasil Penelitian

4.6.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan pada uji parsial (uji t) yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa variabel sistem pengendalian internal memiliki nilai t hitung yang lebih besar dari nilai t tabel (2,979) dengan nilai signifikansi (0,004) yang lebih kecil dari taraf signifikansi yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, menjadikan hipotesis H1 dapat diterima. Semakin tinggi pengimplementasian sistem pengendalian internal akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sudarsono dan Darsono (2017) yang menguji tentang pengaruh sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap pelaporan keuangan pemerintah Daerah Kab.

Grobogan menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah Kabupaten Grobogan. Hasil penelitian yang serupa juga dinyatakan oleh Surastiani dan Handayani (2015) dan Husna (2017) yang menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Pengimplementasian sistem pengendalian internal yang tepat dan sesuai, dengan ditinjau dari indikator lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan mampu memberikan dampak yang positif terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Indikator-indikator tersebut dijabarkan dan diwujudkan dalam kegiatan operasional SKPD di Pemerintah Kota Malang, di antaranya seperti adanya pengendalian fisik atas aset yang dimiliki, pencatatan transaksi yang disertai dengan bukti transaksi yang sah, dan adanya upaya untuk menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan, menjadikan laporan keuangan yang dihasilkan oleh Pemerintah Kota Malang memiliki kualitas informasi yang baik dan dapat bermanfaat bagi para penggunanya. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa dengan diimplementasikannya sistem pengendalian internal yang baik, kemungkinan terjadinya kecurangan dapat diminimalisir dan akan berdampak pada laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

4.6.2 Pengaruh Pengawasan Inspektorat Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan pada uji parsial (uji t) yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa variabel pengawasan inspektorat memiliki nilai t hitung yang kurang dari

nilai t tabel (0,519) dengan nilai signifikansi (0,605) yang lebih besar dari taraf signifikansi yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pengawasan inspektorat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, menjadikan hipotesis H2 ditolak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nova (2015) yang menguji peran internal audit pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, menyimpulkan bahwa peran internal audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini juga tidak selaras dengan penelitian Husna (2017) yang menyimpulkan bahwa peran inspektorat memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 24 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja inspektorat disebutkan bahwa inspektorat daerah memiliki fungsi untuk melakukan revidi terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, tidak disebutkan secara lebih lanjut bahwa inspektorat memiliki tugas untuk memastikan saran ataupun rekomendasi yang telah diberikan, telah dilakukan tindak lanjut oleh masing-masing SKPD. Hal ini menunjukkan inspektorat selaku auditor internal pemerintah hanya menekankan perannya sebagai pengawas sedangkan peran sebagai konsultan dan katalis masih kurang optimal, menjadikan hasil penelitian ini tidak berpengaruh secara signifikan.

4.6.3 Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan pada uji parsial (uji t) yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa variabel penatausahaan aset tetap memiliki nilai t hitung yang lebih besar



dari nilai t tabel (3,929) dengan nilai signifikansi (0,000) yang lebih kecil dari taraf signifikansi yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara penatausahaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, menjadikan hipotesis H3 dapat diterima. Semakin tinggi pelaksanaan kegiatan penatausahaan aset tetap akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Widiati, Nugraha, dan Novianty (2021) di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penatausahaan aset tetap berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian serupa juga dinyatakan oleh Febrianti (2016) di pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya menyimpulkan bahwa penatausahaan aset tetap yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Kegiatan penatausahaan aset tetap di instansi pemerintah daerah dapat ditinjau dari rangkaian kegiatan yang dilakukan, mulai dari kegiatan pembukuan, kegiatan inventarisasi, dan berakhir pada kegiatan pelaporan. Dalam upaya melakukan pengendalian atas aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, kegiatan penatausahaan aset tetap ini bertujuan agar aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah dapat diketahui keberadaannya dan diketahui kondisi serta besaran nilainya. Kegiatan penatausahaan ini bertujuan agar besaran nilai aset yang dilaporkan dalam laporan keuangan sesuai sebagaimana mestinya. Dikarenakan kegiatan penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan menjadikan setiap prosesnya harus dilakukan dengan baik dan teliti, karena jika terjadi kesalahan

dalam pelaksanaannya akan berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan yang dihasilkan. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa baik buruknya kegiatan penatausahaan aset tetap yang dilakukan dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4.6.4 Pengaruh Komitmen Manajemen Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan pada uji parsial (uji t) yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa variabel komitmen manajemen memiliki nilai t hitung yang kurang dari nilai t tabel (-0,068) dengan nilai signifikansi (0,946) yang lebih besar dari taraf signifikansi yang telah ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara komitmen manajemen terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, menjadikan hipotesis H4 ditolak.

Hasil penelitian ini tidak selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggaraeni, Purnamawati, dan Atmadja (2015) yang menyatakan bahwa komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan di SKPD Kabupaten Badung. Salah satu karakteristik kualitatif yang harus dimiliki oleh setiap laporan keuangan adalah karakteristik andal, dimana karakteristik tersebut digunakan untuk menunjukkan bahwa informasi di dalam laporan keuangan berkualitas. Sebagai pegawai pemerintahan sudah menjadi keharusan bersikap bertanggungjawab dan profesional dalam bekerja sesuai dengan tupoksinya. Atas dasar tersebut, meskipun ada atau tidaknya komitmen pimpinan satuan kerja perangkat daerah selaku manajemen. Para pegawai di lingkungan pemerintahan akan selalu berupaya untuk bekerja dengan sebaik mungkin sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan untuk mendukung

upaya tercapainya tujuan organisasi. Selain itu, pada proses perekrutan pegawai maupun pendelegasian wewenang kepada setiap pegawai telah disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki pegawai tersebut, yang dapat ditinjau dari latar belakang pegawai maupun pengalaman yang dimiliki oleh setiap pegawai sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang akan diemban. Hal ini menjadikan ada atau tidaknya kebijakan yang diwujudkan dalam instruksi dari pimpinan, pengalokasian sarana dan prasana yang mendukung kegiatan operasional organisasi, sosialisasi dan pelatihan kepada setiap pegawai tidak berpengaruh terlalu signifikan terhadap kinerja organisasi, yang dapat dinilai dari laporan keuangan yang dihasilkan.





BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai pengaruh dari sistem pengendalian internal, pengawasan inspektorat, penatausahaan aset tetap, dan komitmen manajemen terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yang artinya semakin baik penerapan sistem pengendalian internal akan semakin meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.
2. Pengawasan inspektorat tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam menjalankan tupoksinya inspektorat daerah tidak memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa saran ataupun rekomendasi yang ada telah ditindaklanjuti. Hal ini menjadikan inspektorat lebih menekankan perannya sebagai pengawas dibading peran yang lainnya, menjadikan pengawasan yang diberikan inspektorat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh secara signifikan.
3. Penatausahaan aset tetap berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sebagai sebuah rangkaian kegiatan, kesalahan yang terjadi dalam kegiatan penatausahaan akan berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan

bahwa semakin baik kegiatan penatausahaan aset yang dilakukan, semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

4. Komitmen manajemen tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan sebagai pegawai atau aparat pemerintahan, sudah menjadi keharusan bagi setiap pegawai untuk bersikap profesional dan bertanggungjawab sesuai dengan tupoksinya, sehingga ada atau tidaknya komitmen manajemen tidak akan begitu berpengaruh terhadap kinerja organisasi yang dapat ditinjau dari kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya mengambil empat variabel independen yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu sistem pengendalian internal, pengawasan inspektorat, penatausahaan aset tetap, dan komitmen manajemen sehingga terdapat variabel independen lainnya yang belum mampu dijelaskan yang mungkin memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang terjadi dalam penelitian ini, maka saran yang dapat dijadikan rekomendasi untuk penelitian berikutnya yaitu

1. Bagi peneliti selanjutnya untuk menggunakan item pertanyaan yang bermakna negatif, agar mengetahui keseriusan responden dalam menjawab kuesioner yang diajukan.

2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain, seperti variabel penerapan penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dengan tujuan untuk mengetahui faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki pelaksanaan sistem pengendalian internal dan penatausahaan aset tetap agar ke depannya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan semakin baik dan permasalahan-permasalahan yang menjadi temuan BPK selama ini dapat teratasi.
4. Bagi inspektorat daerah untuk memastikan saran atau rekomendasi yang diberikan telah difindaklanjuti oleh SKPD yang bersangkutan melalui monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan.
5. Bagi pimpinan SKPD untuk terlibat aktif sebagai upaya komitmen manajemen untuk memastikan proses penyusunan maupun perbaikan laporan keuangan telah sesuai dengan kaidah yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

AAPI. (2013). *Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia*. Jakarta

Andiani, Novira J., Hapsari. Dini W. & Muslih M. (2017). Pengaruh Penatausahaan dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta). *E-Proceeding of Management*, 4 (3). 2796-2803.

Anggaraeni, M, Purnamawati. I G. A., & Atmadja, Anantawikrama T. (2015). Pengaruh Pengawasan Keuangan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan, dan Komitmen Manajemen Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada 15 Dinas di SKPD Kabupaten Badung). *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(1).

Armando. Gerry. (2013). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah. (Universitas Negeri Padang, Padang).

Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2020). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2020. Diakses dari <http://jatim.bpk.go.id/category/siaran-pers/>

Bastian, Indra. (2011). *Audit Sektor Publik* (edisi 2). Jakarta: Salemba Empat.

Cavalluzzo, Ken S. & Ittner, Christopher D. (2004). *Implementing Performance Measurement Innovations: Evidence from Government. Accounting, Organizations and Society*, 29. 243-267.

Febrianti, Sukma. (2016). Analisis Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Ekonomi Manajemen*, 10(1). 151-171.

Ghozali, Imam H. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Yogyakarta: UNDIP.

Hery. (2015). *Pengantar Akuntansi Comprehensive Edition*. Jakarta: PT. Grasindo.

Husna. Tissa N. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern dan Peran Inspektorat Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Pekanbaru). *JOM FEKON*, 4(1). 2835-2849.

Jusuf, Al. Haryono. (2014). *Auditing (Pengauditan Berbasis ISA)*. Yogyakarta: STIE YKPN.

Mardiasmo. (2018). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI

Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi* (edisi 4). Jakarta: Salemba Empat

Nadirsyah. (2008). Pengaruh Hasil Audit Ekstern dan Komitmen Manajemen Terhadap Keefektifan Pengendalian Intern dan Kinerja Keuangan Perusahaan (Survei pada Emiten Manufaktur di Bursa Efek Jakarta). *Jurnal MAKSI*, 8(1).

Noya, Wati S. (2015). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Komitmen Karyawan, dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. (Universitas Negeri Padang, Padang).

Ompusunggu, Sensia G. & Salomo, Roy V. (2018). Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(2). 72-80

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4876>.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5095>.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/138973>.

Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/48944>.

Pramudiarta, Rizal & Juliarto, Agung. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Inter terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah (Studi Persepsi Pegawai SKPD di Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal). *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(3), 1-14

Priyatno, Duwi. (2014). *SPSS 22: Pengolahan Data Terpraktis*. Yogyakarta: ANDI



Rahayu, Sri, Yudi & Rahayu. (2018). Strategi Penerapan Paradigma Baru dalam Peran Auditor Internal Organisasi Pemerintah. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 2(2), 255-261.

Robbins, Stephen P. & Judge, Timothy A. (2007). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat

Sudarsono, Galih & Darsono. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Grobogan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(2), 1-10.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Supriadi, Haliah, & Kartini. (2017). Pengaruh Komitmen Pimpinan terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (Studi pada Pemerintah Kabupaten Jeneponto). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS*.

Trihendradi, C. (2013). *Step By Step IBM SPSS 21: Analisis Data Statistik*. Yogyakarta: ANDI

Torar, R. (2018). Analisis Peran Inspektorat Kabupaten Sebagai Auditor Internal “Studi Kasus di Kabupaten Klaten”. (Skripsi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta).

Widiati, Wini, Nugraha, Arie A. & Novianty, Ira. (2021). Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(2), 253-260

Yushita, Amanita N. (2010). Earnings Management dalam Hubungan Keagenan. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 8(1). 53-62.



Lampiran 1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Galih Sudarsono, Darsono (2017)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Grobogan	<ul style="list-style-type: none"> • Dependen: Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah • Independen: Penerapan Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 	Analisis Regresi	Sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, dan penerapan akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah
2	Tissa Nurul Husna (2017)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern dan Peran Inspektorat Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Dependen: Kualitas Laporan Keuangan • Independen: Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, dan Peran Inspektorat 	Analisis Regresi	Kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan peran inspektorat berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

3	Meyta Anggareni, I Gusti Ayu Purnamawati, Anantawikrama Tungga Atmadja (2015)	Pengaruh Pengawasan Keuangan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan, dan Komitmen Manajemen Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Dependen: keterandalan laporan keuangan • Independen: Pengawasan Keuangan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan, dan Komitmen Manajemen 	Analisis Regresi	Pengawasan Keuangan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan, dan Komitmen Manajemen berpengaruh positif terhadap keterandalan laporan keuangan
4	Sukma Febrianti (2016)	Analisis Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya	<ul style="list-style-type: none"> • Dependen: Kualitas laporan keuangan • Independen: Pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan 	Analisis Regresi	Pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
5	Wati Sri Nova (2015)	Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Komitmen Karyawan, dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemeintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Dependen: Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah • Independen: Pemahaman akuntansi, komitmen karyawan, dan peran internal audit 	Analisis Regresi	Pemahaman akuntansi dan komitmen karyawan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan peran internal audit berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah



6	Wini Widiati, Arie Apriadi Nugraha, Ira Novianty	Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung	<ul style="list-style-type: none">• Dependen: Kualitas laporan keuangan• Independen: Penatausahaan aset tetap	Analisis Regresi	Penatausahaan aset tetap berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
---	--	--	--	------------------	---

**Lampiran 2****Tabulasi Data**

Nama SKPD	No	Sistem Pengendalian Internal (X1)												Total
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	56
	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	58
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	53
	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	5	5	57
	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
Badan Keuangan dan Aset Daerah	7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
	8	5	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	4	49
	9	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	51
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
	11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	59
	12	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	59
Badan Pendapatan Daerah	13	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	54
	14	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	59
	15	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	54
BAPPEDA	16	5	4	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	57
	17	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	59
	18	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	5	5	55
SATPOL PP	19	5	5	5	5	4	5	4	4	4	5	5	4	55
	20	5	5	4	3	4	5	5	4	4	3	4	5	51
	21	4	2	3	3	4	5	4	4	5	4	4	4	46

Nama SKPD	No	Sistem Pengendalian Internal (X1)												Total
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
SATPOL PP	22	5	2	4	4	4	5	3	3	4	5	5	4	48
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	23	5	4	4	4	4	4	3	4	3	5	5	5	50
	24	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	51
	25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
	26	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	51
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
	28	4	4	4	3	4	4	3	4	5	4	3	4	46
	29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
	30	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	50
	31	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	49
Dinas Kesehatan	32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	49
	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
	34	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	50
	35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	49
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
	37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
	38	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	55
	39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
Dinas Komunikasi dan Informatika	40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
	41	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	46
	42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
DISKOPERINDAG	43	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	59
	44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	51

Nama SKPD	No	Sistem Pengendalian Internal (X1)												Total	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Dinas Lingkungan Hidup	45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49
	46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
	47	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	47
	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	50
DPUPR-PERKIM	49	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
	50	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	4	55	
	51	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	51	
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	52	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
	53	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	54	
	54	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
	55	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
Dinas Perhubungan	56	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	50	
	57	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	47	
Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah	58	4	4	5	3	4	4	3	4	5	4	3	4	47	
	59	5	5	4	3	4	5	5	4	4	3	4	5	51	
	60	5	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	4	49	
DINSOS-P3AP2KB	61	5	5	4	4	5	5	5	4	5	4	5	5	56	
	62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	47	
	63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
	64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
DISNAKER-PMPTSP	65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
	66	5	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	51	
	67	4	3	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	49	

Tabulasi Data

Nama SKPD	No	Peran Pengawasan Inspektorat (X2)										Penatausahaan Aset (X3)						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total	1	2	3	4	5	6	Total
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	5	4	4	4	5	5	5	4	4	40	5	5	5	5	5	5	30
	2	4	4	4	5	4	4	4	4	4	37	4	4	4	4	4	4	24
	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	4	4	4	24
	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5	5	4	4	5	5	28
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	40	5	5	5	5	5	5	30
	6	4	4	4	4	4	5	4	5	5	39	5	5	5	5	5	5	30
	7	4	4	4	4	5	5	4	5	5	40	5	5	5	5	5	5	30
	8	4	4	3	4	3	4	4	4	4	34	4	4	4	4	5	5	26
Badan Keuangan dan Aset Daerah	9	5	5	4	5	4	5	5	4	4	41	5	5	5	5	4	5	29
	10	5	5	5	5	4	4	4	4	5	41	5	5	5	5	5	5	30
	11	5	4	5	4	3	4	4	3	4	36	5	5	5	5	5	5	30
	12	5	5	4	4	4	4	4	4	4	38	5	5	5	5	5	5	30
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13	4	3	4	4	4	4	4	4	4	35	4	4	4	4	4	4	24
	14	5	5	4	4	4	4	4	3	3	36	5	5	5	5	5	5	30
	15	4	4	3	4	4	4	4	4	4	35	4	4	4	4	4	4	24
Badan Pendapatan Daerah	16	5	5	4	5	5	5	5	5	5	44	5	5	5	5	5	5	30
	17	5	5	5	5	5	5	5	3	4	42	5	5	5	5	5	5	30
	18	5	4	4	4	4	4	5	4	4	38	4	4	4	4	5	4	25
	19	5	4	4	4	4	4	5	4	4	38	4	4	4	4	5	4	25
BAPPEDA	20	5	3	3	4	4	4	4	3	3	33	5	3	5	5	5	5	28
SATPOL PP	21	4	4	3	4	2	3	4	3	3	30	4	4	4	4	4	5	25
	22	4	4	4	4	2	4	4	3	4	33	4	5	4	5	5	5	28

Nama SKPD	No	Peran Pengawasan Inspektorat (X2)										Penatausahaan Aset (X3)						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total	1	2	3	4	5	6	Total
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	23	5	5	3	4	4	4	4	4	4	37	4	4	4	4	5	4	25
	24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	4	4	4	24
	25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5	5	5	5	5	5	30
	26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	4	4	4	24
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	4	4	5	25
	28	4	4	3	4	3	4	3	2	3	30	4	4	4	4	4	3	23
	29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	4	4	4	24
	30	4	4	4	4	4	4	4	4	5	37	4	4	4	4	5	4	25
	31	4	4	3	4	4	4	4	4	5	36	4	4	5	4	4	4	25
Dinas Kesehatan	32	4	4	3	4	4	4	4	4	4	35	4	4	5	4	4	4	25
	33	5	4	3	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	5	4	4	25
	34	4	5	3	4	4	4	4	4	5	37	4	5	5	4	4	4	26
	35	4	5	4	3	4	4	4	4	4	36	4	4	5	4	4	4	25
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	4	4	4	24
	37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	4	4	4	24
	38	4	4	4	4	5	5	4	4	4	38	4	5	5	5	5	5	29
	39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	4	4	4	24
Dinas Komunikasi dan Informatika	40	4	5	4	4	3	4	4	3	4	35	4	4	3	3	4	4	22
	41	3	3	3	3	3	3	3	4	4	29	4	4	4	4	4	4	24
	42	4	4	4	4	3	4	3	3	4	33	4	3	3	3	3	3	19
DISKOPERINDAG	43	5	5	4	4	4	4	4	4	4	38	4	4	4	4	4	4	24
	44	4	4	3	4	4	4	4	4	4	35	4	4	4	4	4	4	24
Dinas Lingkungan Hidup	45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	4	4	4	24

Nama SKPD	No	Peran Pengawasan Inspektorat (X2)										Penatausahaan Aset (X3)							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total	1	2	3	4	5	6	Total	
Dinas Lingkungan Hidup	46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	4	4	4	24
	47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	4	4	4	24
	48	5	4	5	4	5	5	4	3	4	4	39	5	5	4	4	5	4	27
DPUPR-PERKIM	49	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	38	5	4	5	4	4	5	27
	50	3	4	3	4	4	3	4	5	4	4	34	5	4	5	5	5	5	29
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	51	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	40	4	5	5	5	5	4	28
	52	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5	5	5	5	5	5	30
	53	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	35	4	4	4	4	4	4	24
	54	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	43	5	5	5	4	5	5	29
	55	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5	5	5	5	5	5	30
Dinas Perhubungan	56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	5	5	5	3	4	5	27
	57	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	38	4	4	5	5	4	5	27
Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah	58	4	4	3	4	3	4	3	2	3	3	30	4	5	5	4	4	4	26
	59	5	4	5	4	5	5	4	3	4	4	39	5	5	5	3	5	5	28
	60	5	5	4	4	4	4	4	3	3	3	36	5	5	5	3	4	5	27
DINSOS-P3AP2KB	61	5	5	2	5	4	4	4	3	3	3	35	5	5	5	5	5	5	30
	62	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	32	4	4	4	4	4	4	24
	63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	4	4	4	24
	64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	4	4	4	24
DISNAKER-PMPTSP	65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	4	4	4	24
	66	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	34	4	5	4	4	4	4	25
	67	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	35	4	4	4	4	5	5	26

Tabulasi Data

Nama SKPD	No	Komitmen Manajemen (X4)										Total
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	42
	2	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	39
	3	4	4	2	5	5	5	5	5	4	5	44
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	48
	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	44
	6	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	44
	7	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	48
Badan Keuangan dan Aset Daerah	8	4	4	4	4	5	4	4	3	4	4	40
	9	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	41
	10	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	49
	11	4	4	4	4	5	5	5	4	5	5	45
	12	4	5	3	4	4	4	5	5	5	4	43
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
	14	4	5	5	5	5	5	5	5	3	4	46
	15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
Badan Pendapatan Daerah	16	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	47
	17	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	47
	18	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	42
	19	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	42
BAPPEDA	20	5	5	5	4	5	5	3	4	3	4	43
SATPOL PP	21	4	4	3	4	4	4	2	3	4	3	35
	22	5	5	1	4	4	5	5	5	4	4	42

Tabulasi Data

Nama SKPD	No	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)											Total
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	4	4	4	5	4	4	5	4	5	5	4	48
	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
	3	4	4	5	5	4	4	5	4	4	5	5	49
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
	7	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	53
Badan Keuangan dan Aset Daerah	8	4	4	5	5	4	4	4	5	4	5	4	48
	9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
	11	5	5	5	5	4	5	4	5	3	5	4	50
	12	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	54
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
	14	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	54
	15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
Badan Pendapatan Daerah	16	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	54
	17	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	53
	18	5	5	4	5	4	4	5	5	5	5	5	52
	19	5	5	4	5	4	4	5	5	5	5	5	52
BAPPEDA	20	4	4	4	4	4	4	5	5	2	5	5	46
SATPOL PP	21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
	22	5	5	5	4	5	4	4	5	5	4	4	50

Lampiran 3

Uji Kualitas Data

Sistem Pengendalian Internal

Pengawasan Inspektorat

Correlations

		Sistem Pengendalian Internal
X1.1	Pearson Correlation	.684**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	67
X1.2	Pearson Correlation	.708**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	67
X1.3	Pearson Correlation	.819**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	67
X1.4	Pearson Correlation	.809**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	67
X1.5	Pearson Correlation	.823**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	67
X1.6	Pearson Correlation	.706**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	67
X1.7	Pearson Correlation	.740**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	67
X1.8	Pearson Correlation	.797**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	67
X1.9	Pearson Correlation	.589**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	67
X1.10	Pearson Correlation	.613**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	67
X1.11	Pearson Correlation	.710**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	67
X1.12	Pearson Correlation	.667**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	67

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Reliabilitas

Sistem Pengendalian Internal

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.914	12

Correlations

		Pengawasan Inspektorat
X2.1	Pearson Correlation	.638**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	67
X2.2	Pearson Correlation	.569**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	67
X2.3	Pearson Correlation	.680**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	67
X2.4	Pearson Correlation	.675**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	67
X2.5	Pearson Correlation	.788**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	67
X2.6	Pearson Correlation	.798**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	67
X2.7	Pearson Correlation	.809**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	67
X2.8	Pearson Correlation	.629**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	67
X2.9	Pearson Correlation	.676**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	67

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Reliabilitas

Pengawasan Inspektorat

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.859	9

Penatausahaan Aset Tetap

Correlations

		Penatausahaan Aset Tetap
X3.1	Pearson Correlation	.832**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	67
X3.2	Pearson Correlation	.787**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	67
X3.3	Pearson Correlation	.830**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	67
X3.4	Pearson Correlation	.732**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	67
X3.5	Pearson Correlation	.797**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	67
X3.6	Pearson Correlation	.851**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	67

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Reliabilitas

Penatausahaan Aset Tetap

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.889	6

Komitmen Manajemen

Correlations

		Komitmen Manajemen
X4.1	Pearson Correlation	.686**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	67
X4.2	Pearson Correlation	.742**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	67
X4.3	Pearson Correlation	.379**
	Sig. (2-tailed)	.002
	N	67
X4.4	Pearson Correlation	.784**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	67
X4.5	Pearson Correlation	.729**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	67
X4.6	Pearson Correlation	.716**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	66
X4.7	Pearson Correlation	.826**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	67
X4.8	Pearson Correlation	.768**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	67
X4.9	Pearson Correlation	.327**
	Sig. (2-tailed)	.007
	N	67
X4.10	Pearson Correlation	.573**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	67

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Reliabilitas

Komitmen Manajemen

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.825	10

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

		Kualitas LKPD
Y1	Pearson Correlation	.808**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	67
Y2	Pearson Correlation	.895**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	67
Y3	Pearson Correlation	.679**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	67
Y4	Pearson Correlation	.857**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	67
Y5	Pearson Correlation	.868**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	67
Y6	Pearson Correlation	.840**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	67
Y7	Pearson Correlation	.868**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	67
Y8	Pearson Correlation	.882**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	67
Y9	Pearson Correlation	.547**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	67
Y10	Pearson Correlation	.865**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	67
Y11	Pearson Correlation	.842**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	67

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Reliabilitas

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.941	11



Lampiran 4

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.001	4.716		.212	.833		
	Sistem Pengendalian Internal	.369	.124	.349	2.979	.004	.410	2.437
	Pengawasan Inspektorat	.076	.147	.054	.519	.605	.514	1.945
	Penatausahaan Aset Tetap	.928	.236	.491	3.929	.000	.362	2.762
	Komitmen Manajemen	-.011	.167	-.008	-.068	.946	.372	2.691

a. Dependent Variable: Kualitas LKPD

Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.869	3.141		-.277	.783
	Sistem Pengendalian Internal	.026	.082	.061	.310	.758
	Pengawasan Inspektorat	.027	.098	.048	.273	.786
	Penatausahaan Aset Tetap	.119	.157	.158	.758	.451
	Komitmen Manajemen	-.058	.111	-.108	-.524	.602

a. Dependent Variable: Abs_RES

**Lampiran 5****Lembar Kuesioner**

**Kepada Yth.
Bapak/Ibu Responden**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyusunan skripsi Program Studi Akuntansi Universitas Brawijaya, bersama dengan surat ini peneliti bermaksud menyusun penelitian yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pengawasan Inspektorat, Penatausahaan Aset Tetap, dan Komitmen Manajemen Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Adapun identitas dari peneliti:

Nama : Novan Eko Priyo Wiguno

NIM : 175020300111048

Memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk berkenan meluangkan waktu untuk memberikan jawaban atas pernyataan-pernyataan yang diajukan dalam kuesioner sesuai dengan yang Bapak/Ibu ketahui, pahami, dan rasakan. Partisipasi Bapak/Ibu sangat penting bagi kesuksesan penelitian ini, dimana seluruh informasi atas jawaban yang diberikan akan terjaga kerahasiaannya dan semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian dan penyusunan skripsi.

Demikian surat ini peneliti sampaikan, atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu, peneliti sampaikan terimakasih.

Hormat Saya,

Novan Eko Priyo W

Kuesioner Penelitian

Petunjuk Pengisian

1. Kuesioner ini ditujukan kepada Bapak/Ibu Pegawai SKPD Kota Malang yang terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kota Malang.

2. Berilah tanda centang (✓) pada setiap jawaban yang menurut Bapak/Ibu paling sesuai dengan yang Bapak/Ibu ketahui, pahami, dan rasakan

1 : Sangat Tidak Setuju (STS) / Tidak Pernah

2 : Tidak Setuju (TS) / Jarang

3 : Netral (N) / Kadang-kadang

4 : Setuju (S) / Sering

5 : Sangat Setuju (SS) / Selalu

Data Responden

Nama SKPD :

Posisi/Jabatan :

Usia : Tahun

Jenis Kelamin : Pria Wanita

Pendidikan Terakhir : SMA D-3 S-1 S-2

Latar Belakang Pendidikan : Akuntansi Ekonomi non-Akuntansi

Non-Ekonomi (mohon diisi)

Lama Bekerja di SKPD : Tahun Bulan

Daftar Pertanyaan

A. Sistem Pengendalian Internal

No.	Pernyataan	1 STS	2 TS	3 N	4 S	5 SS
1	SKPD memiliki struktur organisasi dan pembagian tanggungjawab yang dapat diuraikan dengan jelas					
2	Masing-masing pegawai telah melakukan pekerjaannya secara efektif, sesuai tanggungjawabnya dan peraturan yang berlaku					

No.	Pernyataan Penilaian Resiko	1 STS	2 TS	3 N	4 S	5 SS
1	Pimpinan SKPD menetapkan tujuan organisasi dan mengkomunikasikan tujuan tersebut kepada seluruh pegawai					
2	Pimpinan SKPD menetapkan strategi dan mengkomunikasikan strategi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi kepada seluruh pegawai					

No.	Pernyataan Aktivitas Pengendalian	1 STS	2 TS	3 N	4 S	5 SS
1	SKPD melakukan pengendalian fisik atas aset yang dikuasai oleh tiap SKPD					
2	SKPD melakukan pencatatan atas transaksi yang terjadi disertai dengan bukti transaksi yang sah					
3	Pimpinan SKPD melakukan evaluasi secara berkala terhadap capaian dan sasaran yang telah ditetapkan					
4	Sistem pengendalian internal di tiap SKPD selalu diperbarui secara berkala					

No.	Pernyataan Informasi dan Komunikasi	1 STS	2 TS	3 N	4 S	5 SS
1	Terjalannya komunikasi yang baik antar SKPD sebagai upaya sinergitas lintas sektoral untuk mendukung tujuan dan program pemerintah kota					
2	SKPD selalu melakukan pembaruan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) secara berkala					

No.	Pernyataan Pemantauan	1 STS	2 TS	3 N	4 S	5 SS
1	Pimpinan SKPD melakukan pemantauan dalam proses penyusunan laporan keuangan hingga laporan keuangan selesai disusun					
2	Adanya tindak lanjut yang dilakukan terhadap rekomendasi dari hasil audit dan reviu yang telah dilakukan					

B. Pengawasan Inspektorat

No.	Pernyataan Pengawas	1 STS	2 TS	3 N	4 S	5 SS
1	Inspektorat daerah melakukan pengawasan terhadap kepatuhan SKPD dalam menjalankan fungsinya					
2	Inspektorat daerah melakukan observasi kelemahan dan permasalahan yang terjadi di tiap SKPD					
3	Inspektorat daerah melakukan inspeksi mendadak di tiap SKPD					
4	Inspektorat daerah melakukan peninjauan kesesuaian antara program dan perencanaan di SKPD					

No.	Pernyataan Konsultan	1	2	3	4	5
		STS	TS	N	S	SS
1	Inspektorat daerah memberikan layanan konsultasi dalam penyusunan laporan keuangan					
2	Inspektorat daerah memberikan saran dan rekomendasi kepada SKPD atas permasalahan yang terjadi					
3	Inspektorat melakukan peninjauan secara berkesinambungan terhadap tindak lanjut yang dilakukan SKPD					

No.	Pernyataan Katalis	1	2	3	4	5
		STS	TS	N	S	SS
1	Inspektorat daerah turut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan yang strategis di SKPD					
2	Inspektorat daerah bersama tiap-tiap SKPD mengevaluasi laporan keuangan yang telah direviu					

C. Penatausahaan Aset Tetap

No.	Pernyataan Pembukuan	1	2	3	4	5
		STS	TS	N	S	SS
1	Adanya kegiatan pembukuan dapat menjadi bahan evaluasi antara perencanaan dan capaian yang telah dilakukan SKPD dalam hal pengadaan barang					
2	Adanya kegiatan pembukuan menjadikan keberadaan barang yang dimiliki oleh SKPD dapat ditelusuri dengan jelas					

No.	Pernyataan Inventarisasi	1	2	3	4	5
		STS	TS	N	S	SS
1	Adanya buku inventarisasi dapat membantu proses rekonsiliasi saat penyusunan laporan keuangan					
2	Baik/buruknya kegiatan inventarisasi yang dilakukan SKPD dapat mempengaruhi laporan keuangan yang dihasilkan					



No.	Pernyataan Pelaporan	1 STS	2 TS	3 N	4 S	5 SS
1	SKPD selalu menyusun laporan barang pengguna setiap semesternya dan setiap tahunnya					
2	Laporan barang milik daerah digunakan sebagai bahan menyusun neraca laporan keuangan					

D. Komitmen Manajemen

No.	Pernyataan Adanya Kebijakan	1 STS	2 TS	3 N	4 S	5 SS
1	Adanya kebijakan atau instruksi dari pimpinan SKPD terkait penyusunan laporan keuangan SKPD					
2	Adanya kebijakan atau instruksi dari pimpinan SKPD untuk menindaklanjuti rekomendasi atas hasil revidu yang telah dilakukan					
3	Kurangnya komitmen atau dukungan dari pimpinan SKPD untuk menggunakan laporan kinerja pegawai (e-kinerja) dalam menyusun kebijakan, dapat menghambat pengukuran kinerja organisasi					

No.	Pernyataan Alokasi Sumber Daya	1 STS	2 TS	3 N	4 S	5 SS
1	Pimpinan SKPD mendelagasikan wewenang dan tanggungjawab berdasarkan pada kompetensi pegawai yang bersangkutan					
2	Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung penyusunan laporan keuangan yang berkualitas					
3	Pimpinan SKPD memastikan pengalokasian dana sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku					

No.	Pernyataan Sosialisasi	1 STS	2 TS	3 N	4 S	5 SS
1	Kebijakan atau peraturan yang dibuat pimpinan SKPD dapat tersampaikan kepada seluruh pegawai					
2	Adanya evaluasi secara berkala terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan SKPD bersama para pegawai					



No.	Pernyataan Pelatihan	1 STS	2 TS	3 N	4 S	5 SS
1	Adanya pelatihan terhadap para pegawai SKPD secara berkala					
2	Adanya diskusi atau konsultasi dengan inspektorat daerah maupun pihak ketiga untuk memperbaiki kinerja SKPD yang kurang optimal					

E. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

No.	Pernyataan Relevan	1 STS	2 TS	3 N	4 S	5 SS
1	Laporan keuangan dapat digunakan sebagai acuan untuk evaluasi kinerja organisasi					
2	Laporan keuangan dapat digunakan sebagai pertimbangan perencanaan program dan kebijakan yang akan dibuat					
3	Laporan keuangan disampaikan tepat waktu					
4	Laporan keuangan yang disajikan memuat informasi keuangan secara lengkap sesuai PP No. 71 Tahun 2010					

No.	Pernyataan Andal	1 STS	2 TS	3 N	4 S	5 SS
1	Laporan keuangan disajikan sesuai realita yang terjadi dan terbebas dari kesalahan yang material					
2	Informasi yang termuat dalam laporan keuangan terbebas dari kesalahan dan pengertian ganda yang menyesatkan					
3	Laporan keuangan disajikan secara umum yang bertujuan untuk dapat digunakan oleh penggunaanya secara luas (tidak memihak pihak tertentu)					

No.	Pernyataan Dapat Dibandingkan	1 STS	2 TS	3 N	4 S	5 SS
1	Laporan keuangan yang disajikan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya					
2	Laporan keuangan yang disajikan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan milik pemerintah daerah lain					



No.	Pernyataan Dapat Dipahami	1 STS	2 TS	3 N	4 S	5 SS
1	Catatan Atas Laporan Keuangan disajikan sebagai informasi penjelas untuk meningkatkan pemahaman pengguna					
2	Laporan keuangan yang disajikan dapat dipahami oleh penggunanya dengan jelas					



